

MAKALAH

Pengantar Sejarah Filsafat Yunani:^{1*} Sofisme

A. SETYO WIBOWO^{2**}

PENDAHULUAN

*Sofisme merujuk pada aliran filsafat dan Retorika pada periode Yunani Klasik serta Hellenistik, yang dalam pandangan umum dianggap mengajarkan Relativisme moral dan cara berargumentasi yang tampaknya masuk akal namun fallacious (keliru). Seorang Sofis (Yunaninya *sophist*MEs) adalah pengajar yang dikenal pintar (pintar), tetapi untuk minteri (mengelabui). Dari kata Yunani *sophos* (bijaksana) dan kata kerja *sophizesthai*, maka bahasa Inggris memiliki istilah *sophistic*, *sophistical* (bdk. *The New Oxford Dictionnary of English*, 1998). Dalam tuturan sehari-hari, kadang kita mendengar : « Wah sophisticated (canggih) sekali ! »*

Sofisme yang marak di era demokrasi Yunani Kuno adalah cara berpikir dan berargumentasi yang njlimet, canggih, sangat rasional dan pintar, tetapi sebenarnya palsu dan membuat orang bingung serta tidak tahu lagi mana yang benar atau salah. Sofisme identik dengan Relativisme. Manakala hukum hanya kesepakatan, dan tolok ukur menyepakati sesuatu adalah persepsi manusia berdasarkan kepentingannya sendiri (atau kelompoknya), maka daya persuasif kata-kata menjadi sangat penting untuk meng-ada-kan apa yang tidak ada, dan sebaliknya. Retorika sofistik adalah alat mengagumkan sekaligus mengerikan yang memunculkan efek Relativisme moral.

I. Sofisme dalam Demokrasi

Abad ke-5 SM di Athena ditandai oleh ajaran-ajaran kaum Sofis yang mengatakan bahwa ajaran moral dan norma hukum hanyalah konvensi masyarakat belaka. Itu sebabnya, sebuah nilai moral atau peraturan berbeda-beda seturut kesepakatan daerahnya. Ada sepuluh nama yang diasosiasikan dengan Sofisme: Protagoras dari Abdera, Gorgias dari Leontini, Prodikos dari Keos, Thrasymakhos dari Khalsedonia, Hippias dari Elis, Euthydemos dari Khios, Dionysodoros, Antiphon, Penulis *Dissoi Logoi* dan Anonim yang disebut oleh Iamblikhos.

¹ * Makalah untuk Kelas Filsafat Yunani Kuna: *Sofisme*, Serambi Salihara, 12 Maret 2016, 16:00 WIB. Makalah ini tidak disunting. (Redaksi)

² **A. Setyo Wibowo adalah Direktur Pogram Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Ia memperoleh gelar doktor dari Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, Prancis.

Beberapa nama lain yang sering disertakan dalam deretan kaum Sofis (seperti Alkidamas murid Gorgias, Xenias dari Korintus, Lykophron) tidak disepakati oleh para ahli. Nama lain seperti Kritias, meski dipengaruhi cara berpikir sofistis, tidak bisa secara ketat disebut Sofis karena ia adalah bangsawan Athena. Sedangkan tokoh Kallikles, meski mempraktekkan argumentasi sofistis, sulit dianggap Sofis karena kurangnya data di luar teks Platon (bdk. Luc Brisson, 1998, hl. 97-98).

Kaum Sofis muncul sekitar tahun 450-380 SM, periode kejayaan Athena setelah dua kali menang perang melawan Persia sampai mulai mundurnya Athena akibat perang saudara melawan Sparta. Fenomena Sofisme membelah para penafsir. Yang satu melihat kaum Sofis sebagai guru-guru yang hanya peduli uang dan mendiskreditkan kebijaksanaan tradisional yang serba gratis. Kaum Sofis dianggap mewakili gejala merosotnya moral dan keringnya spekulasi intelektual yang terlepas dari kenyataan, karena kursus pendidikan mereka hanya peduli pada bagaimana memenangkan argumen. Yang lain melihat Sofisme sebagai asal-usul sistem persekolahan modern, dan kaum Sofis adalah kaum cerah, yang membebaskan pikiran bak *European Age of Enlightenment*.

Fenomena Sofisme yang dibenci namun dibutuhkan mirip dengan para pengacara yang di jaman ini sangat laku di Eropa, dan terutama di Amerika Serikat.

"Both sophist and lawyer are well-paid professionals whose cleverness may be admired even as it is considered suspect, both intellectually and morally. We love them, we hate them, we love to hate them. It is hardly surprising that sophists like lawyers, became irresistible targets of popular jokes.

Para Sofis dan pengacara adalah kaum profesional bergaji tinggi. Kepintaran mereka dikagumi, meski kadang intelektualitas dan moralitas mereka dianggap meragukan. Kita menyukai mereka, kita membencinya, kita suka membenci mereka. Maka tidak mengherankan bahwa kaum Sofis maupun pengacara sering menjadi objek lelucon publik." (bdk. John Gibert, 2003, hl. 27, 29).

Di mata Catherine Osborne, kaum Sofis adalah para profesional penjaja kepintaran (*professional in cleverness*). Mirip demokrasi di Indonesia yang lima tahun terakhir penuh sesak konsultan lembaga survei yang menawarkan konsep canggih guna memenangkan mereka yang bayar, kaum Sofis menciptakan imej kepintaran, lantas menetapkan harga mahal untuk mendapatkannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kaum Sofis menjadikan filsafat lahan bisnis di Athena! Pencarian kebijaksanaan bukan lagi aktivitas waktu senggang bagi mereka yang berkecukupan, melainkan *job* berdasarkan *order* (bdk. Catherine Osborne, 2004, hl. 112-113).

Era kejayaan Athena (abad 5 SM) mengokohkan sistem demokrasi. Kesuksesan anak muda ditentukan oleh cara mereka menampilkan diri, atau membela diri dalam forum-forum lembaga demokratis. Kaum Sofis hadir sebagai fasilitator bagi prosedur demokrasi Athena. Mereka adalah *Spin Doctors* (ahli pelintir kata) yang dengan jubah demokratisnya menawarkan harga mahal ketrampilan berbicara bagi orang berduit, supaya mereka sukses berwacana guna mengokohkan popularitas yang penting untuk meraih kesuksesan politis. Memanfaatkan peluang kebebasan demokrasi, kaum Sofis memudahkan rejim plutokratis (kekuasaan orang kaya) menjaga popularitasnya saat memerintah rakyat (bdk. Catherine Osborne, 2004, hl. 114).

II. Hukum adalah Kesepakatan

Dalam buku Platon *Thaetetos* (172a-b), tokoh Sofis bernama Protagoras (490-420 SM) mengajarkan bahwa perihal keindahan, keburukan, keadilan atau ketidakadilan adalah "*apa yang dipercaya polis tertentu sebagai demikian dan kemudian dijadikan hukum (...) karena berkenaan dengan hal adil atau tidak adil, saleh atau tidak saleh (...) itu semua tidak memiliki kodrat dalam dirinya sendiri.*" Dengan bahasa modern, kaum Sofis menganut paham Kontraktualisme dan Konvensionalisme, artinya, nilai moral dan hukum tidak pernah bersumber dari sebuah tuntutan moral otonom, juga tidak berasal dari kewajiban inheren dalam tindak kontrak itu sendiri. Tanpa kodrat dalam dirinya sendiri, nilai-nilai tersebut tunduk pada penilaian berubah-ubah tentang berguna tidaknya nilai-nilai tersebut bagi komunitas pemakainya. Manakala berbicara tentang keutamaan kebijaksanaan (*sophia*) atau keugaharian (*moderation, sophrosune*), kaum Sofis menganggap bahwa keutamaan tersebut dipegang bukan karena demi kodrat jiwa manusia, melainkan sekedar buah konsensus sosial atau karena

akibat pendidikan yang tentu saja hasil kesepakatan komunitasnya (bdk. Monique Canto Sperber, 1998, hl. 254).

Apa yang adil tidak diargumentasikan lewat penalaran tentang kodrat tertentu (entah kodrat jiwa, Negara atau Yang Illahi), melainkan sekedar konsensus yang bisa berubah-ubah. Dalam paham Konvensionalisme dan Kontraktualisme hukum yang mengatur apa yang adil/benar atau tidak adil/benar adalah buah kesepakatan. Seorang Sofis bernama Antiphon berpendapat bahwa adil itu artinya "*tidak melanggar adat Kota-Negara di mana kita hidup di dalamnya*" (DK 87 A 44). Orang-orang kita sering mengatakan "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung". Artinya, kita mesti menghormati adat setiap suku atau masyarakat di mana kita hidup. Realitas perbedaan adat dan aturan ini yang oleh Sofisme menjadi landasan untuk mengatakan bahwa pada akhirnya hukum atau apa yang adil hanyalah soal kesepakatan.

Bila hukum sekedar kesepakatan, di mana batas konsepsi seperti ini? Batasnya muncul manakala ada orang atau sekompok orang kuat yang menolak tunduk padanya. Kontraktualisme kesulitan menghadapi orang-orang yang lewat okolnya menolak kesepakatan (hukum) tertentu. Dan justru di sinilah persisnya konsepsi Sofis membuka peluang besar bahwa akhirnya hukum memang milik mereka yang lebih kuat.

Konvensionalisme hukum memunculkan *kekuatan* sebagai faktor yang menentukan munculnya hukum. Beberapa mitra wicara Platon seperti Thrasymakhos (di *The Republic*), Polos (dalam dialog *Gorgias*) dan Menon (di dialog *Menon*) berpendapat bahwa hukum dan moral di sebuah *polis* mesti tunduk pada kepentingan dan keinginan mereka yang paling kuat. Bagi mereka, moral dan hukum tidak memiliki nilai intrinsik dalam dirinya sendiri, melainkan sekedar ujud dari kehendak mereka-mereka yang defakto paling kuat dan paling berkuasa.

II. A. Thrasymakhos: Keadilan Keuntungan Orang Kuat

Thrasymakhos dengan lantang berpendapat:

"I affirm that the just (to dikaion) is nothing else than the advantage of the stronger. Aku menyatakan keadilan adalah kepentingan mereka yang lebih kuat. Semua bentuk pemerintahan selalu membuat hukum dengan mengikuti kepentingan (mereka yang lebih kuat), baru kemudian hukum dideklarasikan sebagai adil." (Platon, *The Republic* I 338c-339a)

Tak bisa dipungkiri, ini adalah pandangan jernih mengenai realitas sosial, yang kita tahu semua, merupakan bentukan dari kumpulan individu yang hidup bersama. Supaya hidup bersama tertata, muncul kesepakatan membuat hukum. Nyata bahwa hukum yang menopang masyarakat adalah hasil kesepakatan, dan terutama kesepakatan dari para pemimpinnya. Saat pemimpin mengeluarkan hukum, apa yang adil dengan sendirinya adalah yang sesuai dengan hukum tersebut.

Asal-usul keadilan adalah kekuasaan, apa pun jenisnya. Adil adalah apa yang sudah dinyatakan *secara positif* sebagai demikian (dinyatakan dalam hukum). Dan keadilan positif tentu saja berbeda dengan apa yang sering disebut *keadilan moral* yang landasannya bukan sekedar "karena sudah dinyatakan oleh yang berkuasa" melainkan karena sebuah kodrat tertentu (misalnya bahwa adil artinya mengejar kebaikan jiwa, atau *bonum commune*, kebaikan bersama). Posisi Thrasymakhos tajam karena ia tidak mempedulikan perbedaan hukum positif dan hukum moral. Apa yang adil adalah apa yang diputuskan dan dinyatakan oleh pihak yang berkuasa.

Dan sejauh hukum dibuat oleh para pemimpin, yaitu orang-orang yang *lebih kuat* entah karena harta kekayaan atau posisi sosial, maka dengan sendirinya hukum yang dikeluarkan adalah apa yang menguntungkan mereka. Di belakang konsepsi ini, Thrasymakhos memiliki pandangan cukup kelam: manusia adalah makhluk egois yang disetir oleh hasrat *pleonaktik* (hasrat berlebih-lebihan untuk mencari keuntungan diri secara tak terbatas (bdk. Georges Leroux, 2002, catatan kaki 69, hl. 537-540). Istilah "pleonasmé" merujuk pada pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan, misalnya: "Kita *harus* dan *wajib* menang".

Pemimpin, orang lebih kuat, menjalankan pemerintahan mengikuti kepentingannya sendiri. Bila untuk mencapai keinginannya, sang pemimpin harus membuat hukum mengenai apa yang adil dan tak adil, maka bisa diyakini bahwa hukum tersebut hanyalah gincu yang agak berlebihan untuk menutupi seringai serakahnya. Hukum hanyalah kepura-puraan yang sebenarnya tidak ia perlukan untuk mengejar kepentingannya.

Orang-orang seperti Sokrates/Platon dan Aristoteles masih percaya bahwa kesempurnaan seorang pemimpin adalah ketika mendahulukan orang yang ia pimpin, manakala memimpin artinya mencari kebaikan bagi orang lain, melayani kepentingan orang yang dipimpinya (*The Republic* 342c-343a). Aristotelespun jelas menyatakan bahwa lewat keadilan (yang dinyatakan dalam hukum) orang mencari kebaikan bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri (*Ethika Nikomacheia* V 3, 1130a3, 1134b5).

Thrasymakhos menyebut posisi Sokrates seperti itu naif dan lugu. Dengan sengaja, Thrasymakhos mengajukan doktrin yang terang-terangan amoral. Ia sepakat dengan Sokrates bahwa seorang pemimpin memang harus bertindak seperti gembala. Namun Thrasymakhos mencatat bahwa tujuan orang menggembalakan ternak tidak pernah untuk melayani sapi atau dombanya. Pemimpin memang gembala, sejauh tindakannya menggembalakan adalah demi melayani kepentingannya sendiri, yaitu mengeksploitasi ternaknya untuk keuntungannya sendiri. Gembala membuat kandang kokoh, memberi makanan sehat, memperhatikan keamanan domba-dombanya bukan demi kebaikan si domba, melainkan demi kebaikan si gembala sendiri (yaitu, mendapatkan susu, daging serta kulit domba yang bisa ia jual). Orang *phronimos* (bijak), bagi Thrasymakhos adalah orang yang dengan kekuatan dan kecerdikannya menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Orang seperti inilah yang berbahagia (bdk. Georges Leroux, 2002, catatan kaki no. 83, hl. 543).

Roslyn Weiss menyadari bahwa memang seperti itulah kebijaksanaan di dunia kita. "*Thrasymachus is the quintessential wise guy, Thrasymakhos adalah apa yang tipikal disebut orang bijak.*" (Roslyn Weiss, 2007, hl. 90-115). Pandangan bahwa keadilan berarti pemerintahan oleh yang kuat, yang memaksa mereka yang lemah, dan lewatnya si kuat mendapatkan segala keinginannya, adalah kebijaksanaan yang gampang kita temukan di mana-mana. Dengan cara itu orang kuat mendapatkan kekuasaan, kekayaan, reputasi, harta milik dan segala keuntungan yang ia inginkan. Di dunia sehari-hari, inilah yang disebut hidup bahagia.

Posisi Thrasymakhos mencerminkan realisme keras wajah kekuasaan yang tak lain adalah eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Ia menghindari omongan suci tentang moralisme baik-baik atau idealisme yang ia ejek sebagai kreativitas orang lemah menutupi ketidakmampuan dan kekalahan mereka.

Sifat dan posisi Thrasymakhos bisa dibandingkan dengan Kallikles (tokoh Sofis dalam buku Platon berjudul *Gorgias*) yang juga berpendapat bahwa hukum adalah Konvensionalisme. Dua tokoh Sofis ini meruntuhkan keyakinan tradisional masyarakat Athena yang percaya bahwa hukum memiliki landasan kodratiah (misalnya, hukum adalah perintah absolut para dewa). Mereka membawa pendapat baru tentang hukum sebagai sesuatu yang bersifat arbitrer (sewenang-wenang), artinya, tanpa kodrat *fixed* tertentu. Dan bukan hanya sewenang-wenang, mereka menyadarkan masyarakat Athena bahwa apa yang disebut adil/benar/tegak defakto adalah apa yang diputuskan oleh orang yang berkuasa, yang lebih kuat.

Secara sosiologis dan praktis kenyataannya memang seperti itu. Di mana-mana, kelompok mayoritas atau kelompok paling kuat adalah yang menentukan apa yang disebut hukum. Namun kita bisa bertanya: mengapa mesti yang paling kuat yang berkuasa? Jawabannya sederhana: karena hal itu sesuai dengan *alam*. Meskipun kaum Sofis menolak segala teori tentang kodrat (*nature*), toh mereka sendiri mengusung *semacam* Naturalisme, artinya, hukum di mana-mana dibuat oleh yang kuat karena di mana-mana, mengikuti apa yang terjadi di *alam*, faktanya memang begitu. Di hutan rimba, yang paling kuatlah yang menjadi raja di rimba. Hukum manusia adalah cermin dari situasi alamiah.

Sikap seperti itu tampak dalam posisi yang diusung Kallikles yang berpidato:

“Menurut kodrat alamiah, sudah jelas bahwa yang paling buruk selalu paling tidak beruntung, artinya menderita ketidakadilan; (...) Alam menunjukkan: keadilan tampak dalam kenyataan bahwa yang bernilai lebih harus menang dibandingkan yang bernilai kurang, bahwa orang yang mampu (harus menang) daripada orang yang tidak mampu. Sangat jelas bahwa dalam banyak kasus memang demikianlah adanya, bukan hanya di dunia perbinatangan, tetapi juga di polis-polis (kota-negara) dan ras-ras manusia secara umum, keadilan selalu diputuskan sebagai keuntungan pihak yang lebih kuat daripada mereka yang lebih lemah.” (Gorgias 483b-d).

Argumen Naturalisme, yang mengatakan bahwa kondisi alamiah menjadi dasar dalam menentukan soal keadilan, bersifat paradoksal. Kalau orang yang “lebih baik” secara alamiah menjadi pemimpin, dan bisa mendapatkan apa saja yang ia kehendaki, bukankah dengan demikian sebenarnya ia tidak memerlukan hukum? Bila berkaca pada argumen Thrasymakhos, orang yang “lebih kuat” membuat hukum sebagai gincu yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Jadi, dalam arti apa hukum masih dibicarakan di sini? Jangan-jangan hukum diperlukan karena untuk perlindungan diri! Bila demikian, istilah “lebih baik” yang dipakai Kallikles harus dipahami secara lain. Yang “lebih kuat” kali ini merujuk pada kelompok orang lemah yang jumlahnya banyak, yang mampu bersekutu untuk memaksakan sebuah hukum guna melindungi mereka dari ancaman orang kuat!

Dalam arti ini, maka Naturalisme yang ada di belakang keyakinan Sofis harus disebut sebagai *pseudo*-Naturalisme, mengingat kekuatan alamiah yang dimaksudkan tidak secara khusus dikaitkan dengan satu orang yang secara alamiah paling kuat, melainkan juga merujuk pada *sekelompok orang yang secara alamiah lemah* namun bersatu sehingga menjadi “lebih kuat” daripada satu orang kuat. Di dunia perbinatangan tidak selamanya yang dilihat kuat (singa) menang terhadap yang dianggap lemah (semut); soal kuat dan lemah di alam bersifat relatif. Itu sebabnya argumen Naturalisme ini hanya tampaknya saja (*pseudo*) bersandar pada fakta alamiah.

Omongan tentang alam (*nature*) yang tidak sepenuhnya bersangkutan dengan kodrat (*nature*), atau *pseudo*-Naturalisme, menjadi landasan pendapat kaum Sofis bahwa hukum hanyalah kesepakatan. Pada era modern, teori Kontraktualisme yang dilandaskan pada sebuah kondisi alamiah (*state of nature*) diajukan oleh para filsuf seperti Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau.

II. B. Glaukon: Keadilan Keuntungan Kaum Lemah

Meski Glaukon tidak termasuk golongan Sofis, posisinya yang mendukung argumentasi Thrasymakhos menarik untuk ditelisik. Dalam karya Platon berjudul *The Republic* buku II, Glaukon melanjutkan pandangan pesimis Thrasymakhos tentang manusia. Pertama, sejauh tidak diketahui siapa-siapa, manusia cenderung menyukai apa yang tidak adil (melakukan ketidakadilan). Menurut Glaukon tidak ada satu orang pun yang sungguh-sungguh berniat hidup adil (bdk. *The Republic*, 358c, 359b–360d). Kedua, oleh karena itu, bila di mana-mana masyarakat membuat hukum, maka nilai keadilan itu diterima secara terpaksa saja.

Hanya demi kepentingan diskusi, tanpa benar-benar serius memegang sebagai prinsipnya sendiri, Glaukon menyatakan: *“I will lay myself out in praise of the life on injustice, Aku akan meletakkan diriku sebagai pemuja hidup yang tidak adil.”* Glaukon menempatkan diri untuk membela Thrasymakhos, meski dengan cara sebaliknya (yaitu, menekankan peranan orang-orang lemah), supaya dengan cara ini ia bisa memprovokasi bantahan Sokrates (*The Republic*, 358d). Motif sebenarnya Glaukon adalah ingin mendengarkan pendapat Sokrates mengapa kita harus hidup adil. Dalam konteks itu, cara argumentasi Glaukon bisa dimasukkan sebagai argumentasi sofistis. Dengan nada agak main-main, tetapi serius, ia mengargumentasikan posisi bahwa hukum adalah hasil kontrak antara orang-orang lemah.

Glaukon bertitiktolak dari premis menarik: **a)** kebanyakan orang berpendapat bahwa “melakukan ketidakadilan adalah sesuatu yang baik, artinya menguntungkan diri kita”, sementara “dikenai

ketidakadilan adalah sesuatu yang buruk". Dan orang berpendapat bahwa **b)** "dikenai ketidakadilan" rasanya lebih menjengkelkan dibandingkan dengan "kebaikan yang dirasakan dari tindakan tidak adil yang kita buat". Banyak orang paham bahwa melanggar lampu lalu lintas itu menguntungkan dan menyenangkan. Namun kita juga mengerti bahwa saat kita tidak bisa lewat di perempatan jalan akibat motor-motor yang menyerobot sembarangan, kita merasa menjadi orang paling sial sedunia. Jelas dengan sendirinya bahwa dilanggar haknya oleh orang lain rasanya jauh lebih menjengkelkan dibandingkan kesenangan yang didicipi saat kita sendiri menyerobot lampu *bangjo*.

Dari premis-premis itu, Glaukon menyimpulkan: **c)** ketika banyak orang sudah merasakan derita akibat ketidakadilan, mereka lalu bersepakat satu sama lain untuk melarang tindakan yang tidak adil. Orang-orang ini merasa perlu membuat persepakatan karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang lemah yang gampang menjadi korban ketidakadilan. Orang-orang ini sadar bahwa mereka tidak cukup kuat untuk terus menerus menyerobot lampu *bangjo*. Mereka bukanlah anak-anak muda yang nyawanya rangkap tujuh, mereka juga bukan pejabat yang selalu memakai sirene meraung-raung untuk memotong jalur kita. Mereka adalah orang-orang yang tahu diri bahwa mereka lemah, rentan menjadi korban ketidakadilan, sehingga harus bersatu padu untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan tidak mengenakan. Persepakatan itulah, **d)** yang kemudian disebut sebagai hukum, dan apa yang diatur dalam hukum disebut sebagai "adil". Dengan demikian, menurut Glaukon, hukum adalah kontrak yang dimunculkan kaum lemah sebagai akal-akalan untuk melindungi diri mereka dari tindakan tidak adil yang dilakukan orang yang lebih kuat.

Glaukon membela Thrasymakhos dengan argumentasi yang mengatakan bahwa hukum dan keadilan adalah persepakatan antara orang lemah, antara orang yang merasa tidak cukup kuat untuk melakukan ketidakadilan (*in the lack of vigour to do injustice, The Republic, 359b*). *Tampaknya* saja Glaukon berseberangan dengan Thrasymakhos (yang mengatakan bahwa adil adalah keuntungan orang yang lebih kuat). Namun sebenarnya Glaukon masih satu alur dengan Thrasymakhos, sebab menurut argumentasinya, seorang lelaki sejati (*alethos andra, The Republic, 359b*), artinya manusia yang benar-benar kuat, tidak pernah membutuhkan kesepakatan seperti itu. Lelaki sejati, seperti di rimba belantara, adalah yang menentukan hukumnya sendiri, keadilannya sendiri. Dalam arti ini, Glaukon sama sekali tidak menolak argumen Thrasymakhos. Ia melengkapi dan memoles konsepsi hukum *à la* Sofisme: bahwa hukum hanya konvensi, keadilan hukum ditaati tidak secara kodratiah melainkan karena dianggap mewakili kepentingan (satu orang kuat, atau sekelompok orang lemah yang menjadi kekuatan tersendiri). Sejauh kepentingan berubah-ubah, maka hukum dan keadilan juga bersifat relatif.

Yang agak berbeda dari konsepsi keras dari Thrasymakhos, di mana orang kuat memaksakan begitu saja apa yang menurutnya adil, Glaukon mengintrodusir pentingnya *persuasi*. Hukum adalah kepentingan orang lemah, dan supaya orang kuat menerimanya, maka hukum harus diberi *penampakan* yang adil. Perumusan dan cara menyampaikan harus sedemikian rupa agar orang kuat menerima hukum tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan (*The Republic, 359a*) atau layak dihormati (*The Republic, 359b*). Sekali lagi, bukan soal "kodrat keadilan" yang menjadi pokok masalah, melainkan bagaimana membuat hukum (yang mewakili kepentingan kaum lemah) *tampak* adil dan bisa diterima pihak lain.

Bila hukum ditunjukkan sebagai sekedar kesepakatan entah pihak yang kuat atau pihak yang lemah, dan kedua-duanya benar adanya, maka hukum memang ditunjukkan karakternya yang relatif. Apa yang adil menurut hukum tidak mutlak. Semuanya relatif, bisa dibolak-balik sesuai argumennya. Tidak ada landasan solid bagi hukum dan keadilan.

Di jaman itupun Sofisme sudah dianggap merusak hukum, dan dengan itu rasa hormat kepada orang tua serta moralitas tradisional (bdk. Jacqueline de Romilly, 1988, hl. 141-143). Dalam komedi karya Aristophanes dikisahkan bahwa suatu hari Strepsiades ingin mengirim anak-anaknya belajar kepada Sokrates - yang dalam teks-teks Aristophanes dianggap sebagai salah satu Sofis (bdk. *Awan-Awan* 331 dan 360). Strepsiades ingin anaknya menjadi pintar membela kasus-kasus sulit, supaya kelak menjadi "pengacara" berpenghasilan bagus sehingga bisa membantunya membayar hutang-hutang (*Awan-Awan, 116-118*). Namun apa hasilnya? Yang terjadi justru sebaliknya: anaknya itu keluar dari pendidikan dengan keyakinan bahwa ia memiliki hak memukul ayahnya. "*Lho, kamu kok memukul ayahmu? - Jangan khawatir, aku akan membuktikan bahwa aku benar dan berhak memukul orang tuaku.*"

Dalam komedi ini, berkat didikan Sofis, si anak bukan hanya berani memukuli ayahnya, ia bahkan sangat puas karena bisa menunjukkan di depan ayahnya bahwa ia adalah manusia otonom dan sama sekali tidak bergantung pada hukum. Baginya, hukum itu relatif. *"Lho, tidak ada satu hukum pun yang membenarkan anak memperlakukan ayahnya seperti ini. – Bukankah yang membuat hukum itu juga manusia, manusia seperti kamu dan aku, (...)? Bukankah dengan demikian ke depan nanti aku juga bisa membuat hukum baru yang akan mengizinkan anak-anak memukuli orang tuanya?"* (Awan-Awan, 1420-1425). Mengikuti ajaran kaum Sofis yang menunjukkan berbagai aneka hukum yang berbeda di masyarakat yang berlainan, anak itu menambahkan: *"lagi pula, adat/aturan bahwa anak boleh memukuli ayahnya juga ditemukan di kalangan ayam-ayam jantan"* (Awan-Awan, 1421-1429).

Anak Strepsiades yang bernama Pheidippides mengadopsi ajaran kaum Sofis yang mengatakan bahwa hukum adalah kesepakatan, dan karena tidak memiliki kodrat *fixed*, ia bersifat relatif. Salah satu pengajar teori ini adalah **Antiphon**. Baginya, hukum hanyalah konvensi (kesepakatan) belaka, sehingga hukum hanya perlu ditaati manakala cocok dengan kepentingan manusia. Bila ada orang yang menghormati keadilan, itu bukan karena ia memiliki alasan-alasan yang luhur. Ia menghormati keadilan karena hal itu cocok dengan kepentingannya. Jika ia melakukannya *di depan orang lain*, tentu karena ia melihat ada kepentingan yang ia dapatkan. Namun, saat ia sendirian dan tanpa saksi, sudah bisa dipastikan bahwa kepentingan individualistiklah yang mengemuka, karena yang utama baginya bukanlah menghormati hukum melainkan mengikuti kepentingannya sendiri.

Menarik konsekuensi lebih lanjut dari hukum sebagai kesepakatan hasil orang-orang yang mengikuti kepentingan egoisnya sendiri, **Kritias** berpendapat bahwa supaya orang bersedia mengikuti aturan hukum, perlu dibuat ancaman hukuman. Namun, untuk menjamin bahwa orang benar-benar menaati hukum, pun ketika sendirian dan tanpa saksi, perlulah diciptakan semacam "saksi ideal yang melihat segala sesuatu, mendengar semua, dan menimbulkan rasa takut akan hukuman" dalam diri manusia. Singkatnya, ditemukanlah apa yang disebut dewa, atau keillahian. (Werner Jaeger, 1948, hl. 186-187)

Dengan maraknya pengaruh kaum Sofis, situasi Athena menjadi ironis. Dan kalau kembali ke kisah *Awan-Awan*, Aristophanes pun akan memperlihatkan bahwa si bapak tua (Strepsiades) akhirnya juga yakin bahwa pendapat anaknya benar! Ia berkata: *"Kalau mengingat umurku sekarang ini, sepertinya dia yang benar!"* Aristophanes hendak menunjukkan betapa luas pengaruh cara berpikir kaum Sofis di jamannya. Athena dibingungkan dengan cara berargumen yang makin diterima banyak orang ini.

Aristophanes menunjukkan runtuhnya akal sehat dalam salah satu episode *Awan-Awan* berjudul "Akal Muslihat":

"Kamu ketahuan sedang berzinah? Kamu tinggal menjawab kepada suami si perempuan bahwa tidak ada yang jahat di situ. Dan salahkan Zeus untuk soal perzinahan itu. Katakan begini: Zeus juga begitu takluk pada cinta dan pada wanita-wanita. Nah, kalau dibandingkan dengan Zeus, bagaimana mungkin aku yang mortal ini bisa lebih kuat daripada seorang dewa?"

Bukan hanya hukum yang goncang, moral pun kehilangan pijakannya. Bila kepentingan menjadi satu-satunya norma, maka moral yang diusung Thrasymakhos, Kallikles ataupun Glaukon pun menjadi moral-kepentingan yang gampang berubah-ubah sesuai mana situasi yang menguntungkanannya.

Contoh: kasus perdebatan soal pilkada langsung atau oleh DPRD menjadi cermin eksak pertarungan kepentingan di balik Rencana UU Pilkada. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP (dan di tambah Demokrat), yang dulu-dulunya mendukung pilkada langsung, setelah kekalahan Pilpres, mendadak balik kanan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Berbagai argumen dilontarkan.

Yang pro pilkada langsung (PDIP, PKB, Hanura) menitikberatkan hak asasi rakyat, kedaulatan rakyat yang esensial dalam demokrasi. Lagi pula kita tidak boleh mundur ke belakang, ke era Orde Baru. Bila pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD, maka korupsi secara terstruktur, sistematis dan masif akan beralih di ruang-ruang DPRD. Sulit mendapatkan kepala daerah bermutu, bila yang memilih adalah DPRD. Kepala daerah tunduk pada fraksi-fraksi di DPRD, padahal anggota fraksi sepenuhnya adalah boneka para Ketua Partai. Demokrasi diambil dari rakyat dan diserahkan ke Ketua Partai.

Yang pro pilkada lewat DPRD menekankan demokrasi yang produktif, yang efisien tanpa konflik horizontal. *Locus* korupsi diperkecil, tidak lagi meluas sampai bagi-bagi uang ke rakyat, tetapi hanya ke anggota DPRD. Pilkada menjadi murah. Lebih dari itu semua, pilkada langsung, yang dasar hukumnya berasal dari Amandemen kedua UUD 1945 (perubahan atas pasal 6 dan 18 UUD 1945), dianggap sebagai mengkhianati spirit Pancasila. Pilkada langsung dianggap sebagai praktek demokrasi liberal, mengkhianati prinsip "permusyawaratan dan perwakilan" yang khas dalam demokrasi Pancasila.

Mana yang benar? Tjipta Lesmana dengan bijak menulis: "Bagi saya, mau langsung atau melalui DPRD, monggo. Yang penting, ada konsensus nasional, jangan main paksa, apalagi intimidasi" (*Suara Pembaruan*, Selasa, 9 September 2014, hl. A 11). Di balik pertarungan soal RUU Pilkada ini bisa ditengarai adanya motif kekuasaan. KMP yang kehilangan kursi kepresidenan, hendak menerapkan taktik perang gerilya: "kuasai dulu pinggiran sebelum merangsek ke pusat". Asumsinya, bila fraksi-fraksi yang tergabung dalam KMP mayoritas di hampir seluruh DPRD di Indonesia, maka dengan pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD, mereka akan bisa menguasai seluruh kursi bupati, walikota dan gubernur se-Indonesia. Bila seluruh eksekutif daerah dikuasai KMP, tidak mustahil bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla akan macet total. Ide kepentingan kekuasaan semacam inilah yang menjelaskan mengapa parpol-parpol yang kemarin mendukung pilkada langsung, setelah kekalahan KMP dalam Pilpres, mendadak berubah haluan. Hukum, Undang-Undang yang kemarin didukung, mendadak dalam hitungan bulan sudah ditolak karena ada kepentingan yang hendak didesakkan. Namun bila nanti kepentingannya berubah, mengingat di Indonesia ini koalisi sebenarnya hanyalah barisan yang gampang bubar jalan, maka soal pilkada akan dibuat sunyi senyap, dan kita akan disibukkan dengan wacana tentang UU lainnya lagi.

Platon adalah musuh besar kaum Sofis. Ia tidak yakin bahwa pemenuhan kepentingan individu (atau kelompok) menjadi satu-satunya landasan hidup. Platon berpendapat bahwa hidup yang bermoral (berkeutamaan), yang tidak sekedar mengikuti kepentingan rendah (seperti uang atau harga diri), bisa dijustifikasikan secara rasional terlepas dari apa pun norma moral masyarakat yang melingkupinya.

Tetapi di depan fakta dramatis kehidupan, bahwa kita sering menyaksikan orang yang tidak adil justru bahagia (karena mereka pintar membangun citra diri sebagai orang adil) sementara orang yang adil justru seringkali hidupnya sengsara (apalagi mereka biasanya tidak peduli dengan soal citra, tidak mau mengesankan diri baik dan jujur, bdk. *The Republic* II 361 a-c), bagaimana harus memilih jenis eksistensi kehidupan? "Bagaimana aku harus hidup?," itulah pertanyaan yang mendasar. Haruskah hidup ini diisi dengan mencari kekayaan dan reputasi (hal-hal yang *tampaknya* saja baik), atautkah hidup ini harus diisi dengan "memeriksa diri" dan "mencari pengetahuan"?

Filsafat sebagai pemeriksaan diri dan pencarian pengetahuan sejati diejek oleh **Kallikles**. Menurutnya, filsafat membuat orang "*tidak mampu mempertahankan dan menyelamatkan diri serta orang lain dari bahaya-bahaya yang mengancamnya, (dan filsafat) hanya membuat seseorang membiarkan dirinya dirampas seluruh harta bendanya dan sekedar hidup tanpa kehormatan di tanah airnya sendiri.*" (*Gorgias* 486b-c)

Platon memilih filsafat. Baginya, filsafat adalah kebaikan riil karena ia menghindarkan kita dari kontradiksi, memampukan filsuf untuk bertindak sesuai dengan prinsip yang diakui paling baik setelah melewati pemeriksaan dialektis (bdk. Platon, *Kriton* 46b). Filsafat adalah satu-satunya latihan berpikir yang terus menerus mengarahkan dirinya ke Kebaikan sehingga bisa menjaga orang dari satu-satunya kejahatan riil, yaitu ketidakadilan/ketidakbenaran. Bagi Platon, filsafat mendidik diri orang untuk memeriksa diri secara rasional lewat dialog dengan orang lain, menemukan dirinya sebagai berkodrat moral, dan dari situ bertindak sesuai apa yang ia dapatkan secara dialektis.

III. Protagoras: Manusia adalah Ukuran

Sofisme memandang dengan mata jernih, meski tidak mengenakkan, bahwa kepentingan individu (atau kelompok) adalah motor tindakan manusia. Sejauh kepentingan selalu berubah, maka tidak ada norma baku yang universal. Setiap orang benar dalam perspektif dan sudut pandangnya sendiri.

Abad ke-5 SM di Athena menyaksikan serbuan ajaran kaum Sofis yang umumnya berasal dari luar Athena yang menyatakan bahwa nilai moral hanyalah konvensi belaka. Itu yang menjelaskan mengapa tiap komunitas dan bangsa memiliki norma moral dan hukum yang berbeda-beda. Seperti sudah disebut di atas, salah satu tokoh Sofis bernama **Protagoras** mengatakan bahwa apa yang indah, buruk, adil atau tidak adil adalah apa yang dipercaya *polis* tertentu sebagai demikian dan kemudian dijadikan hukum (*Theaitetos*, 172a-b). Tidak ada keadilan atau kesalehan kodratiah yang bersifat universal. Nilai-nilai keadilan atau kesalehan disepakati sebagai nilai oleh ada manusia atau komunitas politis yang mengusungnya. Sejauh nilai itu berguna dan memenuhi kepentingannya, nilai itu dipegang, bila tidak cocok lagi, disepakatikan ulang. Pengajaran etis kaum Sofis memang memusatkan perhatian pada manusia. Kaum Sofis membebaskan cara berpikir orang-orang Athena dari kekolotan pola pikir agamis serta kosmogonis, dan mengusulkan semacam otonomi etis. Posisi ini secara ekstrem mengatakan bahwa "*manusia adalah ukuran segala sesuatu*". Ujung doktrin seperti ini adalah Relativisme (bdk. Monique Canto-Sperber, 1998, hl. 254; Jean-François Pradeau, 2009, hl. 31-32; Luc Brisson, 1998, hl. 100).

Bila adil artinya melakukan dan menjalankan sesuatu sesuai hukum, sementara hukum adalah buatan manusia, maka manusialah yang mengatur "apa yang adil" itu sesuai kepentingan dan kekuatan masing-masing. Sejauh "*manusia adalah ukuran segala sesuatu, panton khrematon metron estin anthropos*", dan sejauh manusia berbeda-beda satu dengan lainnya, maka wajar kalau keadilan adalah milik satu atau sekelompok orang yang kuat (secara fisik, ekonomis, relasional). Tidak ada tolok ukur universal untuk nilai keadilan. Yang membuat sebuah nilai menjadi universal adalah manusianya

Protagoras dikenal sebagai pengarang traktat *Antilogiai (Contrasting Arguments, Argumen Berlawanan)*, yang mengatakan bahwa **dalam debat apa pun setiap orang bisa meletakkan dirinya di sisi mana pun** (DK 80 A 20). Lebih dari itu, teknik membuat argumen bantahan bisa membuat orang menggunakan "argumen lemah untuk mengalahkan argumen yang lebih kuat." (DK 80 A 21) (bdk. John Gibert, 2003, hl. 33).

Kita ambil **contoh** soal perdebatan kenaikan harga BBM. Budi ada di kubu yang pro kenaikan BBM, argumennya jelas: beban APBN untuk subsidi minyak sudah tidak masuk akal, dan subsidi ini salah sasaran karena orang-orang bermobil yang menggunakan bensin! Bila ingin mensejahterakan rakyat, naikkan BBM, supaya uang subsidi bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan membantu rakyat cepat kaya. Sebaliknya Ani berposisi anti kenaikan BBM, dan argumennya juga mantap: menaikkan harga bensin akan mengakibatkan kenaikan harga barang pokok, rakyat akan menjerit, inflasi akan meroket, dan ujung-ujungnya APBN juga yang terkena dampaknya. Kalau BBM naik, mayoritas rakyat kecil yang terkena dampaknya. Jauh dari kesejahteraan, mereka yang menanggung akibat kenaikan BBM. Apalagi jika APBN terbebani oleh inflasi tinggi, situasi makin berat untuk pemerintah.

Budi membantah Ani dengan menunjukkan bahwa di atas kertas perhitungan inflasi tidak semenakutkan yang dikatakan Ani. Lagi pula, kalau rakyat menjerit sebentar, itu hanyalah efek pil pahit yang tidak akan lama rasanya. Tetapi Ani tidak mau berpanjang kata. Ani menggunakan argumen lemah, yaitu argumen *ad hominen* (menunjuk orang atau partai tertentu), yang biasanya tidak dipakai dalam perdebatan bermutu. Ani menukas: "Lho, dulu selama pemerintahan SBY partai Anda paling getol menolak kenaikan BBM, mengapa sekarang saat di pemerintahan Anda malah mengusulkan kenaikan BBM? Partai Anda kok *mencla-mencla* ya?"

Untuk suatu permasalahan, selalu dimungkinkan adanya pendapat yang bertentangan. Mirip gelas berisi air separo: yang satu mengatakannya "separo penuh", yang lainnya tegas menyebut "separo kosong". Mana yang benar? Bagi kaum Sofis, sesuatu benar kalau ia menang. Untuk itu, yang menjadi patokan bukanlah fakta adanya gelas yang berisi separo, melainkan bagaimana Anda (sebagai manusia) mampu mengargumentasikan bahwa persepsi Anda yang paling benar.

Dalam tataran tertentu, ada benarnya bahwa manusia memang menjadi ukuran. Seorang dokter akan menganjurkan satu pasien untuk lebih banyak makan, sementara kepada pasien lainnya diet yang ketat. Gula bisa baik buat satu orang, namun membahayakan bagi pasien lainnya. Ukurannya memang orangnya. Relativisme seperti itu sudah dikenal sejak jaman Yunani (Hippokrates VM 8).

Pertanyaannya, kalau udara di sebuah kelas bagi murid A “dingin”, sementara bagi murid B “gerah”, mana yang benar? Siapa yang bisa menilai benar-salah di situ? Bagi Protagoras, persepsi tiap murid sama benarnya. Inilah yang disebut Relativisme:

“the view that things may only be said truly to be some way or another in relation to someone or something else, pandangan yang mengatakan bahwa sesuatu bisa dikatakan sebagai sesuatu dalam arti tertentu atau lainnya dan dalam relasinya dengan orang tertentu atau hal lainnya”.

Udara di ruangan dingin, dan tidak gerah, bagi si A; sementara bagi si B, udara itu rasanya gerah. Dan untuk Protagoras, pendapat A dan B yang saling bertentangan dianggap benar kedua-duanya. Persepsi dan penilaian A dan B sama-sama benarnya; dan tidak ada sebuah komisi independen atau mahkamah apa pun yang bisa memutuskan mana yang benar atau salah. (bdk. John Gibert, 2003, hl. 40).

Cara berpikir seperti itu tentu saja membuat gelisah: kalau persepsi keduanya sama benarnya, bukankah udara di ruangan yang menjadi asal persepsi itu ada? Kalau ada udara, mengapa ia bisa sekaligus dingin dan gerah? Adakah udara itu? Dengan teknologi sederhana kita bisa memakai thermometer untuk melihat objektivitas suhu udara di ruangan. Tanpa kembali ke “fakta”, persoalan persepsi bisa menjadi gawat.

Contoh: kita ingat haru biru Pilpres 2014 ketika kubu Prabowo-Hatta sejak hari pencoblosan (9 Juli 2014) menolak hasil *quick-count* lembaga survei yang kredibel. Dengan entengnya kubu Prabowo-Hatta menuduh bahwa lembaga-lembaga itu melakukan “*perang persepsi*” mengabarkan kemana-mana (lewat teve, Koran dan media sosial) seolah-olah Jokowi-Kalla menang. Dengan argumen “persepsi”, kubu Prabowo-Hatta mengeluarkan hasil *quick-count* dari lembaganya sendiri (yang memenangkan mereka dengan tipis). Rabu malam, 9 Juli 2014, saat mengunjungi SBY di Cikeas, Prabowo mengatakan adanya “perang persepsi”. “Menurut Prabowo, kubunya tak ingin nantinya ada persepsi atau opini yang terbentuk bahwa pihak A sudah memenangi pemilihan presiden. ‘Padahal belum apa-apa. Baru *quick count* tertentu dan versinya macam-macam,’ ujarnya” (bdk. *Tempo*, Kamis 10 Juli 2014). *TV One* kemudian membuat masyarakat bingung sebulan lebih karena menayangkan persepsi bahwa Prabowo-Hatta yang menang Pilpres.

Akal sehat sempat tenang sejenak ketika Prabowo-Hatta mengatakan “kita tunggu hasil hitung akhir KPU”. Ini menenangkan semua orang, karena lepas dari persepsi masing-masing yang subjektif, tentu saja ada data (fakta) yang mesti dirujuk. Persepsi tidak terlepas dari data. Maka data itulah (yang dipegang KPU) yang harus digelar. Mengingat kekhawatiran bahwa data bisa dipalsukan, KPU mengunggah secara *online* berbagai data tersebut. Para relawan turut mengawal data ini lewat situs kawalpemilu.org.

Sinetron Pilpres 2014 berlanjut dengan ketegangan baru ketika pada jam-jam terakhir *real count* suara di KPU (22 Juli 2014), saat kemenangan Jokowi-Kalla sudah di depan mata, tiba-tiba kubu Prabowo-Hatta “*menarik diri dari proses yang sedang berlangsung*”. Kata-kata ini kabur, maknanya bisa ke sana kemari: apakah artinya menarik diri dari proses Pilpres (artinya *walk out*, mengalah WO di pertandingan Pilpres), ataukah artinya menarik diri dari proses penghitungan suara di KPU, tetapi tanpa menarik diri dari proses Pilpres? Para pakar hukum di televisi berdebat dengan njlimet untuk memilah perbedaannya! Yang jelas, Prabowo-Hatta ternyata menganggap diri masih capres-cawapres, sehingga lantas menggugat KPU melakukan kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) ke MK.

Kalau awalnya Prabowo-Hatta masih percaya pada data, dengan menggugat KPU, mereka mempertanyakan data itu sendiri. Mereka yakin bahwa data KPU tidak valid karena proses Pilpresnya curang. Bagaimana mengukur kecurangan? Dengan menunjukkan berbagai tindak kecurangan di sana-sini yang kalau dihitung-hitung telah mencurangi Prabowo-Hatta sekian juta suara. Dan untuk meyakinkan semua orang bahwa kecurangan tersebut riil, maka Prabowo-Hatta mengklaim “data lain” hasil perhitungan PKS.

Babak baru drama pilpres dimulai. Massa dikerahkan, perang opini dijalankan, dan MK disorot. Kasus dan saksi mulai diperiksa. Keterbatasan waktu kerja MK membuat mereka tidak bisa memeriksa semua yang diajukan sebagai kasus. Dan ketika keputusan dijatuhkan (21 Agustus 2014) bahwa KPU terbukti tidak melakukan TSM, bahwa hasil pemilu sah, bahwa kasus yang diajukan dianggap beres, atau walaupun ada kesalahan bisa diadili tanpa perlu mengulangi Pilpres, maka kubu Prabowo-Hatta mengatakan "kami menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat" tetapi sambil berujar bahwa MK belum memberikan "keadilan substantif".

Keadilan macam apa lagi yang dituntut? Apakah adil artinya MK seharusnya memutuskan sesuai "data alternatif" dari PKS, landasan persepsi kubu Prabowo-Hatta? Masalah terbesar dari perang persepsi yang dilancarkan Koalisi Merah Putih adalah bahwa sampai hari ini kita tidak pernah melihat "data alternatif" yang selalu diomong-omongkan sejak 9 Juli 2014 itu.

Relativisme bisa gawat manakala data atau fakta dianggap tidak penting! Seluruh negeri ikut menahan nafas, energi orang terkuras, dan bisnis di kota besar seperti Jakarta merugi milyaran rupiah gara-gara persepsi subjektif tanpa data.

Pada tataran spekulasi, Sofisme Protagoras persis menyentuh relativisme pada titik perkara segenting data ini. Ia menulis di DK 80 B 1:

"Of all things the measure is a human being (anthropos), both of the things that are that they are, and of the things that are not that they are not. Manusia adalah ukuran segala sesuatu, untuk apa yang ada bahwa itu ada, dan untuk apa yang tidak ada bahwa itu tidak ada".

Bagi Protagoras, individu manusia adalah ukuran itu sendiri bagi ada atau tidak adanya sesuatu. Ukuran itu merujuk pada *persepsi inderawi* yang dimiliki berkenaan ada tidaknya sesuatu (bdk. Platon, *Theaitetos* 151e, 152a). Bila demikian, mengikuti doktrin Protagoras, bagi seseorang sesuatu itu *sejauh ada* sejauh dalam persepsi inderawinya sesuatu itu *tampak ada*. Artinya, udara sungguh dingin sejauh bagi si A tampak dingin; sementara udara sungguh gerah sejauh tampak demikian dalam persepsi si B (bdk. John Gibert, 2003, hl. 40-41; Frederick Copleston, 1951, hl. 88). Persepsi adalah tangkapan atas sesuatu melalui alat-alat panca indera (mata, telinga, alat peraba, pencium dan pencicip). Persepsi adalah sebetuk pengetahuan inderawi (*aisthesis*), yang tentu saja kepastiannya di bawah pengetahuan abstrak dan matematis.

Di satu sisi, ada manusia, dengan alat inderanya, yang persepsinya merupakan ukuran; dan, di sisi lain, ada udara di luar sana. Protagoras tidak memperdulikan apakah udara di luar itu panas atau dingin. Yang jelas, bagi persepsi A, udara itu tampak dingin, sementara bagi si B, udara itu tampak gerah. Kalau kita mempertanyakan "udara dalam dirinya sendiri itu apa?", maka jawabannya sederhana: udara dalam dirinya sendiri itu tidak panas dan tidak dingin. **Tafsiran « objektivis »** menekankan bahwa « udara yang tidak panas dan tidak dingin » merupakan *underlying reality* yang lebih mendasar (dan lebih benar) daripada persepsi-persepsi si A dan si B.

Persepsi A : Udara tampak dingin	Persepsi B : Udara tampak gerah
----------------------------------	---------------------------------

Underlying reality : udara dalam dirinya sendiri yang tidak panas dan tidak dingin

Tafsiran "objektivis" menekankan keberlanjutan teori Herakleitos (tentang "logika kontradiksi", bahwa sesuatu adalah sesuatu karena tersusun dari hal-hal yang saling berlawanan). Kelemahan tafsiran ini adalah sumber teksnya yang melulu berasal dari Sextus Empiricus (DK 80 A 14) (bdk. John Gibert, 2003, hl. 42-43).

Tafsiran « infallibilis » menekankan bahwa « *every perception is in fact true, setiap persepsi selalu benar* », karena « *each act of perception changes its object, setiap tindak mempersepsi mengubah objeknya* ». Tafsiran ini juga diasal-usulkan pada Herakleitos yang dalam teks Platon dianggap menyatakan bahwa « *observable reality is in constant flux, realitas yang bisa kita amati selalu bergerak-berubah* ». Bagi si A, udara adalah dingin, karena persis pada saat mempersepsinya udara memang dingin. Bagi si B, udara terasa panas, karena pada saat ia mempersepsinya, udara memang sedang panas. *Realitas (udara) selalu berubah, sehingga persepsi atasnya selalu berubah*. Oleh karena itu, setiap

persepsi dari orang tertentu pada momen tertentu tidak bisa salah (*infallible*). Kelemahan bacaan ini adalah terlalu mengandalkan sumber Platon, sehingga sulit untuk dibedakan mana pemikiran Protagoras yang sesungguhnya dan mana yang merupakan rekonstruksi Platon sendiri (bdk. John Gibert, 2003, hl. 42-43).

Persepsi A: Udara tampak dingin	Persepsi B: Udara tampak panas
Saat itu udara memang dingin	Saat itu udara memang panas

Tafsiran “relativis” memperlihatkan bahwa *tanpa mempedulikan* ada tidaknya sesuatu/objek yang menjadi dasar munculnya persepsi (udara), bagi Protagoras yang ada adalah “persepsi atas udara yang panas” dan “persepsi atas udara yang dingin”. Bagi Protagoras, untuk setiap hal, selalu dimungkinkan mengatakan dua pernyataan yang berkebalikan (DK 80 A 20). Yang terpenting adalah bagaimana dengan kekuatan *logos* (pikiran, kata, pernyataan) orang bisa menyakinkan kepada para pendengarnya bahwa persepsinyalah yang paling benar. Bacaan “relativis” ini selain didukung banyak fragmen, serta cocok dengan iklim intelektual di kalangan kaum Sofis, secara ironis juga menunjukkan orisinalitas Protagoras. Ia mengajukan sebuah cara berpikir yang belum pernah ada sebelumnya di Yunani kuno.

Persepsi A: Udara tampak dingin	Persepsi B: Udara tampak panas
---------------------------------	--------------------------------

Dari segi bahasa, tampaknya Protagoras melompat dari “persepsi inderawi (*aisthanesthai*)” ke “penilaian (*dokein*)”. Aku *mengindera* lewat kulitku bahwa udara terasa dingin; dari situ, kemudian melompat *menilai* “bagiku udaranya dingin”. Dengan menekankan bahwa masing-masing persepsi sah, maka keberadaan data menjadi tidak relevan. **Relativisme seperti ini dalam domain religius menjadi Agnostisisme.**

Dalam fragmen *On the Gods* (DK 80 B 4) Protagoras dijuluki atheis:

« Protagoras menjadi kawan Demokritos yang terkenal atheis. Yang jelas, menurut kata orang, pada awal traktatnya *Tentang para Tuhan* ia menulis : ‘*Berkeanaan dengan tuhan-tuhan, aku tidak mampu mengetahui apakah mereka ada atau tidak ada, apalagi mengenai aspek-aspek mereka. Terlalu banyak hal menghalangi untuk bisa mengetahui (hal-hal itu): mereka sendiri tidak kelihatan dan pendeknya hidup manusia.* » (bdk. Henri-Irénée Marrou, 1964, hl. 89).

Menurut Diogenes Laertios IX, 50-56, akibat doktrin atheis ini, Protagoras diusir keluar dari kota Athena, dan buku-bukunya dibakar di depan umum (bdk. Jean-François Pradeau, 2009, hl. 51-52).

Relativisme Protagoras dikritik Platon bak tindakan memotong kaki kursinya sendiri. Di depan pernyataan “manusia adalah ukuran untuk *segala sesuatu*”, maka sebagai manusia aku juga ukuran yang bisa kuterapkan bagi pernyataan tersebut (karena “segala sesuatu” tentu melingkupi juga “pernyataan” tersebut). Jadi, jika menurutku pernyataan itu salah, maka omongan Protagoras tidak berlaku. Doktrin yang mengatakan “semua hal adalah relatif” beresiko membatalkan sendiri klaimnya, karena dengan menyatakannya, secara logis ia sedang merelatifkan klaimnya sendiri.

Sementara Aristoteles dengan jeli melihat bahwa saat seseorang mengatakan bahwa sesuatu bisa benar bagi satu orang dan salah bagi orang lain, di situ Protagoras sedang melanggar doktrin suci “*the law of noncontradiction*, hukum non kontradiksi” (*Metaph.* 11.6, 1062b 13-20 = DK 80 A 19) (bdk. John Gibert, 2003, hl. 42).

IV. Gorgias: Efektivitas Kata dan Relativisme Moral

Sofisme berasal dari kata *sophisma* (Latin, yang mengambil dari *sophisma* Yunani) yang arti aslinya « temuan yang cerdas », mirip akal-akalan Prometheus saat mencuri api dari para dewa untuk membantu manusia. Dari asal-usulnya, Sofisme terlekat dengan sejenis pengetahuan teknis (*tekne*), kecerdikan menyiasati hal teknis, mirip tukang bangunan atau montir mesin saat berhadapan dengan kesulitan praktis. Maknanya kemudian berkembang dari « kebijaksanaan dan orang bijak (dari *sophia* dan

sophos) » sampai ke « akal-akalan, mengakali dalam arti menipu » (misalnya dalam cara berargumentasi yang kelihatan canggih, namun sebenarnya keliru atau menyesatkan).

Sofisme selalu dikaitkan dengan **Retorika** yang memberi nilai tinggi pada efektivitas bahasa. Kesadaran tajam tentang fungsi bahasa menjadi kritik tersendiri bagi cara berpikir ontologis yang melandaskan bahasa pada ada tidaknya apa yang diungkapkan. Kepercayaan Sofisme pada efektivitas bahasa bahkan bisa « mengadakan » apa yang dalam pemahaman banyak orang « tidak ada ».

Platon dan Aristoteles mengkritik Sofisme sebagai cara berpikir yang *fallacious* (salah, keliru) – artinya, cara berpikir ini bukan hanya salah tetapi juga dilandasi oleh maksud menipu. Memang, bahasa Inggris membedakan antara *fallacy* dan *sophism*. Bila *fallacy* sekedar merujuk pada cara berpikir yang meski tampaknya benar tetapi sebenarnya keliru, maka *sophism* menunjukkan bahwa bukan hanya cara berpikirnya yang sesat melainkan juga adanya maksud untuk menyesatkan. Di mata Platon dan Aristoteles, **Sofisme adalah cara berargumentasi yang berpijak pada penampakan, bukan realitas** (bdk. *Vocabulaire européen des philosophies*, 2004, hl. 1198).

Di mata kaum Sofis, semua bersifat relatif. Yang terpenting adalah bagaimana wacana bisa *mempengaruhi* pendengarnya. Efektivitas wacana tidak ditentukan oleh benar tidaknya wacana, melainkan apakah wacana itu persuasif atau tidak. Sofisme sering didefinisikan sebagai **art of persuasion**, seni mempengaruhi. Retorika sendiri dipahami sebagai *artificer of persuasion*, teknik persuasi (Platon, *Gorgias* 453a, DK 82 A 28). Dan dalam seni ini, kaum Sofis mendapat julukan *deinos*, artinya “yang mengerikan, mengagumkan, layak ditakuti”. Adjektif *deinos* menggambarkan pasukan yang menakutkan, binatang mengerikan, tetapi juga untuk menggambarkan dewi atau raja-raja yang dikagumi dan dihormati (bdk. Luc Brisson, 1998, hl. 99-100). Ada rasa kagum sekaligus ngeri di depan kelihaihan teknik persuasi mereka lewat *logos*.

Perubahan politik dari sistem Tirani (abad ke-6 SM) ke sistem demokrasi di banyak *polis* Yunani (terutama di Athena) menciptakan kebutuhan baru. Demokrasi menuntut orang mampu menjalankan kekuasaan dan mengurus kebijakan publik dengan baik. Dengan demikian, politik menjadi tujuan paling utama hidup mereka. Dari medan perang, pencarian keutamaan (*areté*) beralih ke arena politik: mereka ingin menang, ingin merasa lebih dan ingin efektif. Dalam periode baru demokrasi Athena, kesuksesan (*areté*) hidup bukan lagi dibatasi pada soal keunggulan militer atau kompetisi Olympiade, tetapi terutama di arena politik. Tindakan politis adalah nilai baru yang dikejar orang-orang Athena. Kaum Sofis menawarkan keahlian praktis lewat ilmu Retorika untuk menggapai ideal baru yang muncul di jaman demokratis: *areté* politis (bdk. Henri-Irénée Marrou, 1964, hl. 84; Frederick Copleston, 1951, hl. 83-84).

Kaum Sofis adalah guru-guru pintar yang mengajarkan bagaimana orang bisa hidup sukses dalam masyarakatnya. Yang terpenting adalah hidup saat ini; dan dalam hidup politik soal kebenaran tidaklah begitu penting dibandingkan kesuksesan untuk menyakinkan publik bahwa hal-hal tertentu (pendapat, program, argumentasi) lebih layak diikuti.

Bagi para guru ahli pidato dan teknik persuasi, kebenaran, keadilan, hukum, atau moral – karena tidak memiliki kodrat dalam dirinya sendiri - ditundukkan kepada efektivitas pemenangan argumentasi. Hal-hal normal seperti keadilan dan moralitas menjadi kabur dan tak bernilai oleh kabut argumentasi kaum Sofis.

Landasan moral tradisional digoyahkan oleh para guru yang memperjualbelikan teknik argumentasi formal dan cara berpikir logis namun tanpa substansi sebagai bekal mendapatkan kemenangan dalam perdebatan-perdebatan di ruang publik (*agora*). Ilmu Retorika di tangan kaum Sofis menjadi sarana ampuh untuk beradu argumentasi. Dan ketika pusat perhatian adalah memenangkan debat (efektivitas sebuah wacana) maka Retorika tidak peduli dengan kebenaran. Sejarah bisa dibolak-balik seperti yang dilakukan oleh Gorgias (487-376 SM), salah satu Sofis terkenal. Bila dalam ajaran moral tradisional tokoh Helena dianggap sebagai wanita pezina penyebab perang, Gorgias mampu membalikkan keyakinan banyak orang lewat ketangkasan Retorikanya dalam *Encomium of Helen* (DK 82 B 11) (bdk. Catherine Osborne, 2004, hl. 124-125; Jean-François Pradeau, 2009, hl. 137-142, 485-486).

Dalam **kisah perang Troya** yang dipercayai semua orang Yunani, Helena (istri Menelaus, raja Sparta

di Yunani) jatuh cinta pada Paris (anak raja Troya) yang sedang bertamu ke Yunani. Paris akhirnya menculik Helena tanpa kesulitan karena yang terakhir dengan suka hati lari dengan pemuda tampan ini. Penculikan Helena menyebabkan seluruh raja-raja Yunani bersatu untuk menyerang Troya. Itulah kisah utama *Illias* (karya Homeros).

Dengan argumentasi yang ia kembangkan, Gorgias memberikan beberapa alasan untuk menjelaskan peristiwa yang menimpa Helena. Lewat Retorikanya ia membuktikan bahwa **Helena tidak bersalah**. **Pertama**, sejauh Helena diambil secara paksa, maka ia adalah korban sebuah tindakan buruk, atau paling *banter* korban nasib yang jelek. Kalau manusia percaya bahwa semua peristiwa adalah hasil keputusan para dewa dan *Anagke* (Keniscayaan, Nasib), maka Helena adalah korban permainan para dewa, terutama dewa Eros. Helena bukanlah wanita sebagaimana diomongkan orang-orang Yunani selama ini. Gorgias memperlihatkan bahwa ia meninggalkan suaminya (Menelaus) untuk hidup bersama Paris bukan karena keinginannya sebagai wanita, melainkan karena menaati kehendak para dewa. Pikiran manusia serba lemah, tak bisa dibandingkan dengan kehendak para dewa yang sudah pasti jauh lebih kuat kuasanya. Oleh karena itu, kalau orang menistakan Helena, justru orang itulah yang harus dicela karena tidak menghormati kehendak para dewa. Lagipula, jika Helena pergi ke Troya karena cintanya kepada Paris, ia tidak bisa disalahkan. Mengapa? Karena Cinta (*Eros*) adalah salah satu dewa. Siapakah yang bisa menolak kehendak dewa?

Kedua, Helena juga tidak bisa dipersalahkan sejauh ia menjadi korban *persuasi kata-kata*. Akal sehatnya terbujuk rayu, terbius, sehingga ia percaya dan mengikuti saja apa yang dikatakan Paris, penculiknya. Ia adalah korban jerat kata-kata yang membuatnya tidak berdaya. Gorgias mengatakan bahwa manusia pada umumnya gampang percaya kepada opini daripada realitas. Mengingat realitas tidak stabil, maka kata-kata sangat penting untuk mempengaruhi opini. Kata-kata bisa "meyakinkan" untuk mempercayai sesuatu sebagai realitas, mirip sihir atau obat-obatan (*pharmakon*). Seperti obat, daya persuasif kata-kata bisa positif bisa negatif. *Kata-kata mirip obat*: sebagaimana obat mampu menyembuhkan sakit dan membunuh orang, kata-kata juga bisa membuat orang sedih atau gembira. Kata-kata mampu membuat orang bersemangat, tetapi kata-kata juga meracuni akal sehat, membujuk untuk diikuti. Kalau Helena menjadi korban persuasi negatif kata-kata, itu tidak membuktikan apa pun bahwa ia amoral, ia hanya tidak beruntung saja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut Gorgias, sangat keterlaluan untuk menuduh Helena sebagai wanita yang kotor dan tukang zinah. Helena adalah korban. Ia korban permainan para dewa dan Nasib, serta korban persuasi kata-kata. Untuk itu Helena harus dibersihkan dari segala tuduhan yang ditimpakan padanya selama ini.

Lewat Retorika, Gorgias memberi contoh bagaimana persuasi kata bisa sedemikian hebat memperdaya Helena. Lewat kata-kata pula, Gorgias sedang mempersuasi para pendengarnya sehingga yang benar menjadi salah, dan sebaliknya.

Proses argumentasi membela Helena ini persis sama dengan definisi Gorgias tentang Retorika sebagai *teknik memproduksi opini benar dan opini salah* (Gorgias 449c-457c). Gorgias menjadi orang pertama yang memisahkan antara "kata-kata" dengan "realitas", artinya, tidak ada hubungan antara kata dan realitas, karena realitas itu sendiri menurut Gorgias *tidak ada*; atau lebih tepatnya, ada tidaknya realitas ditentukan oleh kata-kata.

Dalam fragmen berjudul *On Not-Being or On Nature*, Gorgias dikenal mengajarkan hal ini :

- a) **nothing exists** ; tidak ada sesuatu, atau, yang ada hanyalah « ketiadaan »,
- b) *that even if it exists, it is incapable of being apprehended* (*akatalepton*) ; kalau pun « ketiadaan » itu ada, ia tidak bisa ditangkap (pikiran),
- c) *that even if it can be apprehended, it cannot be communicated to another* ; kalau pun « ketiadaan » bisa ditangkap, maka ia tak bisa dikomunikasikan pada orang lain (John Gibert, 2003, hl. 35).

Konteksnya adalah perlawanan Gorgias pada doktrin Parmenides (dan muridnya Zenon) yang menyatakan bahwa « hanya yang ada, ada ; yang tidak ada, tidak ada ». Pikiran bagi Parmenides hanya bisa mulai berpikir jika « ada sesuatu » yang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan tidak ada, maka

pikiran tidak bisa mulai bekerja. Bisakah kita berpikir tentang sesuatu yang « tidak ada » ? Kalau kita memikirkan « ketiadaan (*nothingnes*)», di situ kita justru sedang meng-ada-kannya (*nothingness* dipikirkan sebagai *something*). Doktrin Parmenides teguh mengatakan « pikiran dan ada adalah satu dan sama ».

Lewat seni persuasi kata-kata, Gorgias dengan enteng membuktikan bahwa kebalikannya juga mungkin. Kalau Parmenides yakin bahwa “yang ada, ada; yang tidak ada, tidak ada”, maka Gorgias sebaliknya menyatakan “tidak ada sesuatupun, tidak ada realitas apa pun, yang ada hanyalah *ketiadaan*”. Bila Parmenides *committed* pada “ada”, maka **Gorgias mampu menunjukkan bahwa siapa pun bisa *committed* pada “ketiadaan”**. Bila “ada”-nya Parmenides sedemikian penuh, menyeluruh, menyatu dengan pikiran, sehingga tak terkatakan, maka Gorgias pun menunjukkan hal yang sama: “ketiadaan” tak mungkin dikomunikasikan.

Retorika adalah ilmu persuasi. Yakin pada kekuatan kata-kata, Retorika tidak terlalu peduli pada “*what is*” (pada realitas, pada fakta, apa yang ada seada-adanya). Kalau sikapnya yang *uncommitted* terhadap realitas dituduh mengada-adakan apa yang tidak ada, Retorika membela diri dengan mengatakan bahwa jika yang ia katakan memang “tidak ada”, seharusnya tidak mungkin ditangkap apalagi dikomunikasikan. Jadi bagaimana? Retorika akan membiarkan kita kebingungan: di satu sisi, berarti apa yang dikatakannya pasti entah bagaimana berhubungan dengan realitas tertentu (karena terkomunikasikan dan bisa kita tangkap), tetapi di sisi lain, kita tetap tidak yakin apakah realitas yang dirujuknya itu ada atau tidak ada karena apa yang dikatakan tampak mengada-ada saja.

Contoh: fakta bahwa Prabowo-Hatta berhasil mempengaruhi orang bahwa “ada kecurangan Pilpres”, meski datanya sampai sekarang tidak pernah dikeluarkan oleh PKS, menunjukkan bahwa kata-kata, apalagi kalau dinyatakan dengan penuh keyakinan, bisa membingungkan, mempengaruhi, dan menciptakan “realitas” yang lalu dipercaya oleh sebagian kalangan. Data lembaga survei, data KPU, hasil sidang MK, dan berbagai *hard evidences* seolah dianggap begitu saja sebagai “konstruksi persepsi” pihak Jokowi-JK. Mereka menganggap semua data keras itu sejajar dengan “persepsi yang mereka bangun” bahwa Pilpres curang. Prabowo-Hatta dengan persepsinya menciptakan ada-nya “data” seolah-olah Pilpres kemarin memang benar-benar curang.

Dengan teknik logikanya, Gorgias membuktikan kebalikan dari apa yang biasa dipercayai orang. Helena yang salah menjadi benar. Dan orang Yunani yang benar, justru menjadi salah. Persis itulah yang disebut Sofisme yang tidak jauh dari **logika bengkok**. Lebih gawat lagi, dengan cara seperti itu, Gorgias sedang menjungkirbalikkan moral sehari-hari yang dipegang orang Yunani. Helena harus dibebaskan dari penilaian moral yang selama ini mengungkungnya sebagai wanita amoral penyebab peperangan. Sekaligus dengan kepandaiannya memelintir kata-kata, Gorgias menunjukkan kepada kita bahwa *persuasive speech* (kata-kata persuasif) merupakan alat yang bisa digunakan untuk apa pun: tujuan baik maupun tujuan buruk. Sebagai alat yang indifferen, kata-kata (*logos*) adalah sarana yang ampuh. *Logos* adalah *powerful lord* (*megas dunastes*) yang dengan subtil masuk ke diri kita, mencegah kegalauan hati, menciptakan kegembiraan, atau memunculkan rasa belas kasihan (bdk. John Gibert, 2003, hl. 35)

Lebih parahnya lagi, cara berlogika seperti itu bagi Gorgias **hanyalah alat untuk bersenang-senang** guna menunjukkan bahwa ia mampu membenarkan pesanan kasus apa saja. Ia guru populer, dan orang-orang Athena membutuhkan nasehat serta *trick* seperti itu supaya bisa sukses dalam kehidupan politik, atau membela diri manakala mereka terkena kasus-kasus di pengadilan.

Gorgias mungkin hanya bermain-main logika saja, namun kesadaran modern makin melihat pentingnya kekuatan persuasif kata-kata. Fenomena **efek placebo** membuat kita sadar bahwa kata-kata bisa mempengaruhi pikiran. Dokter yang *mengatakan* bahwa kita diberi obat alergi, padahal sebenarnya hanya vitamin, bisa membuat percaya bahwa kita sedang diberi obat alergi. Efek kata-kata dokter bisa membuat kita percaya bahwa kita sudah diobati, sehingga kita sembuh. Fenomena kekuatan hipnotis atau ramal-meramal (misalnya ketika seseorang meramal nasib Anda akan begini atau begitu, atau ketika Anda mengutuk seseorang akan seperti ini atau itu) membuat kita bertanya-tanya sejauh mana kata-kata sungguh bisa mengadakan apa yang sebelumnya tidak ada. Kata-kata bisa membius dan membuat kita dipaksa mengikuti apa pun yang dikatakan oleh si pembius. Dalam istilah yang canggih, ada kekuatan performatif bahasa. Lewat bahasa Anda “menyabdakan” supaya sesuatu terjadi, dan

cukuplah sabda itu diulang-ulang, maka orang lain, atau Anda sendiri akan menjadikannya realitas. Bila Anda selalu mengatakan bahwa anak Anda bodoh, maka si anak akan percaya bahwa ia memang bodoh. Bila otoritas resmi menyatakan “Kalian resmi menjadi suami dan istri”, maka terjadilah demikian. Dengan kesadaran-kesadaran ini, kita memang tidak bisa main-main dengan kata-kata. Ada sebuah kekuatan (*force*) yang tidak tampak. Bila dengan tangan atau senjata kita bisa memaksa orang mengikuti kemauan kita, kata-kata adalah *invisible force* yang daya rusak (atau daya sembuhnya) mengerikan sekaligus mengagumkan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata-kata persuasif bisa masuk, merasuk, dan mempengaruhi seseorang tanpa disadari. Saat melihat iklan mie instan yang enak, dengan lagunya yang indah, dan anak-ibu ceria yang berakting memakannya dengan nikmat, kita sadar bahwa itu hanya jualan iklan. Kesadaran kita menolak tegas untuk dipengaruhi oleh lagu dan ucapan (kata-kata) serta imaji yang ditawarkan mie tersebut. Namun ketika kita melihat iklan yang sama di papan reklame di jalanan, lalu mendengar yang sama di radio, meskipun kesadaran menolak iklan-iklan itu (karena kita tahu bahwa mie instan tidak sehat), saat kita masuk ke supermarket, kita menjadi maklum betapa kekuatan persuasif kata (dan imaji) yang merasuk secara sub-liminal bisa memaksa dengan halus supaya akhirnya kita memilih produk tersebut. *Subliminal message* adalah pesan-pesan yang disampaikan secara sedemikian rupa sehingga tanpa kita sadari, persepsi sub-sadar kita menyerapnya (sehingga bisa terpengaruh). Pada era Gorgias belum ada eksploitasi gambar atau film lewat media semasif jaman kita. Hal ini justru membuat kita lebih kagum betapa *hanya* lewat kata-kata persepsi kita akan realitas bisa dipengaruhi.

Penutup: Perlawanan Platon

Setelah kaum *phusikoi* dengan berani mengajukan berbagai teori tentang *phusis* (alam) yang beraneka ragam, bertitiktolak dari kekuatan *logos*, kaum sofis mengekstremkan fungsi *logos* untuk memperlihatkan bahwa satu-satunya sumber nilai dan kebenaran adalah manusia sendiri (Protagoras). Lebih gawat lagi, dengan cara main-main Gorgias menunjukkan bahwa tidak ada realitas objektif yang bisa dijadikan titik tolak bersama karena yang namanya realitas tak lain hanyalah “ciptaan” *logos* yang persuasif. Dari Relativisme teoretis seperti ini, yang kelihatannya tanpa guna dan keuntungan imediat apa pun, kaum sofis lainnya menarik konsekuensi sosial politisnya ke titik ekstrem: apa yang baik *bagi seseorang*, itulah aturan dan keadilannya. Masyarakat dengan “*bene commune* (kebaikan bersama)” ditundukkan oleh kepentingan diri pribadi (yang menjadi sumber pengartian sewenang-wenang tentang apa itu “yang adil, yang baik”) (Franco Trabattoni, “Prefazione”, *I Sofisti*, 2007, hl. 12). Thasymakhos, Kallikles dan juga Antifon menjadi pemikir-pemikir politik yang mengajukan sebuah “realisme politik” keras, yaitu, bahwa politik tak lain adalah “politiknya mereka yang lebih kuat”. Kekacuan sosial-politik yang muncul di Athena akibat Sofisme sangat jelas dari drama komedi yang dibuat Aristophanes (berjudul *Awan-Awan*): moral nenek moyang dipermainkan, hukum ditafsir seenaknya, opini ngawur lebih populer daripada opini akal sehat, dan akhirnya kekerasan fisik diidamkan sebagai wasit terakhir untuk menyelesaikan masalah. (Franco Trabattoni, 2007, hl. 17).

Platon (dan juga Aristoteles) berusaha menghadapi kekacuan pemikiran di jamannya. Tanpa *telos* (sebuah tujuan yang disepakati bersama) sulit untuk mendapatkan aturan guna disepakati bersama untuk mencapainya. *Telos* pula yang mengijinkan adanya koreksi-koreksi secara internal bila terjadi penyimpangan di masyarakat. Istilah “koreksi” muncul karena adanya “penyimpangan” atas *telos* yang disepakati. “Penyimpangan bukanlah penyimpangan” bila tidak ada “tolok ukur bersama” yang disepakati. Kaum sofis menghilangkan tolok ukur sehingga di mata mereka tidak ada pula yang namanya penyimpangan. Tiadanya tolok ukur membuat manusia harus saling bertarung guna memenangkan dirinya sendiri. Hasrat memenangkan kepentingan diri ujudnya menjadi: ragam opini kanan kiri, tipu-tipu yang tampak valid, bahkan kalau perlu kekuatan fisik.

Lewat teori-teorinya, Platon dan Aristoteles akan berbicara tentang semacam “*telos*” yang harus disepakati, sebuah universalitas yang membantu kita untuk memilah, memilih dan menata realitas agar benar-benar terarah pada sesuatu yang baik.

Platon hidup sejaman dengan kaum Sofis. Ia bertempur melawan mereka. Ia sama sekali tidak simpatik dengan amoralitas kaum Sofis yang memanfaatkan demokrasi sebagai lahan pertempuran persepsi lewat kata-kata yang bagi mereka hanyalah alat netral. Bagi Platon, masalahnya adalah soal

tujuan akhir penggunaan kata-kata. *Logos* adalah sarana penting guna sampai ke kebenaran. Tanpa mementingkan soal menang-kalah (efektivitas kata), Platon lebih memilih bahwa *logos* mengatakan kebenaran. Pencarian kebenaran adalah pencarian tanpa kepentingan apa pun kecuali kepentingan kebenaran itu sendiri.

Titik tolaknya adalah anggapan bahwa kebenaran itu riil, lalu diperjuangkan bagaimana menemukan dan merumuskannya dengan kata-kata. Sofisme tidak peduli dengan kebenaran, karena kata-kata yang efektif, yang memenangkan persuasi, yang akan memunculkan realitasnya sendiri.

Ketika Sacco, seorang jurnalis, hendak mewawancarai pengungsi Palestina di kamp Rafah: "Bak singa terluka, perempuan yang telah kehilangan rumah, suami, dan anak laki-lakinya yang mati ditembak tentara Israel itu – (...) 'mengaum' di muka Sacco. Dia berkata sudah sering diwawancarai, bahkan oleh stasiun televisi Israel. Dia sudah biasa. Dia mau tahu apa manfaatnya bicara dengan Sacco. (...) Perempuan itu jengkel atas dukungan dari negara-negara Barat yang *yang cuma kata-kata*. Dia mau tahu bagaimana kata-kata bisa mengubah keadaan. Dia mau melihat sebuah tindakan nyata." (*Koran Tempo*, Minggu, 14 September 2014).

Kata-kata yang berderet-deret di Koran dan berbuih-buih di televisi beresiko mendevalusi realitas. Inflasi kata yang tinggi membuat realitas tak bernilai. Perempuan itu membutuhkan tindakan konkret perubahan realitas, bukan tambahan wacana. Jurnalisme yang sofistik, yang buih-buih kata-katanya indah, kadang kala harus bertatapan muka dengan realitas seperti itu, supaya tidak autis dan sadar bahwa "dunia tak selebar kata-kata".

Platon memerangi Sofisme. Ia mengutuk cara berpikir dan metode logika mereka. Di satu sisi, kaum Sofis adalah para pendidik tulen yang memunculkan fenomena budaya intelektual di Athena. Mereka menolong orang menggunakan akal budinya secara maksimal. Namun di sisi lain, seperti juga sudah disadari oleh Sokrates dan Platon pada jamannya, kaum Sofis jatuh dalam **bahaya *sophistiquerie* (omong pintar untuk minteri/menipu)**. Karena sombong merasa mampu melogiskan segala sesuatu, dan karena terlalu yakin bisa merasionalkan segala hal, Sofisme menjadi terlalu banyak membual. Sejak Platon, kata Sofisme praktis menjadi **musuh filsafat, kembaran hitam filsafat**, dan diucapkan sebagai cemoohan (bdk. Jean-François Pradeau, 2009, hl. 7-9, 18).

Dalam pandangan Platon: "*the Sophist has no serious claim to be a thinker; he is immoral and a teacher of immorality besides, Sofis tidak layak disebut pemikir; ia amoral, bahkan ia adalah guru amoralitas*". Sampai abad 19, para pemikir mengikuti opini negatif Platon dan Aristoteles terhadap kaum Sofis.

Upaya keras Platon mengendalikan kaum Sofis mirip dengan usaha seseorang menahan tutup panci yang airnya sedang bergolak mendidih. Bukan hanya sulit (karena lama-lama tutup panci juga terasa panas), tetapi juga penuh bahaya karena air mendidih yang terus bergolak bisa muncrat keluar mengenai orang yang berusaha menahannya. Selama berabad-abad kerja keras Platon (dan juga Aristoteles) kurang lebih berhasil menakutkan orang bahwa kita memang perlu adanya semacam "universalitas", semacam tolok ukur untuk menciptakan tatanan supaya hidup individual dan hidup bermasyarakat berpedoman pada sesuatu yang dianggap benar dan baik.

Namun hasil berabad-abad filsafat (misalnya, primasi yang universal- kebenaran, kebaikan, keindahan -, kejelasan apa itu subjek dan objek, ilmu politik dan etika yang 'ilmiah' - artinya diatur sesuai norma universal tertentu) **saat ini mulai runtuh**. Tutup panci sudah *mencelat*, dan air mendidih bergejolak menyembur kemana-mana tanpa mau dikendalikan lagi oleh apa pun atau oleh siapa pun. Analisis **Heidegger** yang mengkritik tajam Sejarah Filsafat Barat sebagai sejarah "metafisis" membuat kredibilitas *logos* turun ke titik nadir. Kritik tajam ini membuka pintu baru bagi berjenis-jenis filsafat di abad ke-20 (Eksistensialisme, Fenomenologi Prancis, Post-Strukturalisme dan Posmodernisme) yang tak lagi mengusung *logos* dengan kebenaran universalnya. Segala efek turunannya tampak dalam redupnya ilmu politik dan etika normatif. *Anything goes*, atas nama narasi kecil, narasi besar didiskreditkan; atas nama sejarah orang kalah, maka sejarah kaum pemenang dianggap keliru. Bila itu semua dilakukan demi majunya pemahaman (sebuah *logos*) tentu baik-baik saja mengajukan teori baru, kisah baru atau sejarah baru supaya kita makin mengerti sebuah peristiwa. Namun benarkah selalu begitu?

Gorgias menjalankan metode yang mengkhawatirkan saat ia membolak-balik sejarah. Kisah Helena (sejarah yang ditulis kaum pemenang, yaitu Yunani) ia runtuhkan untuk menekankan bahwa Helena hanyalah “korban” (artinya Gorgias menulis ulang dari perspektif sejarah orang kalah). Apakah dengan itu Gorgias hendak memberikan alternatif guna melengkapi sejarah? Teori yang ia ajukan secara dialektis akan membuat sejarah Yunani lebih *compassion* dengan orang kalah? Bila itu yang diajukan Gorgias, tentu tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Tujuan semacam itu baik-baik saja. Namun bukankah bagi Gorgias *logos* tidak memiliki *telos*? Bukankah Gorgias tidak percaya pada dialektika (sejenis *logos*) mengingat ia selalu mengajarkan tentang *ketiadaan*.

Gorgias sendiri mengakui bahwa motifnya membolak balik sejarah hanyalah “main-main”, sekedar untuk menunjukkan bahwa ia *pinter*. Bagi kaum Sofis, *untuk hal apa pun* mereka bisa mengatakan *kebalikannya* secara rasional dan argumentatif. Kalau dipikir-pikir lebih lanjut, bukankah aktivitas seperti Gorgias ujung-ujungnya hanya “mengiklankan diri” supaya dikenal, terkenal, dan dari situ mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi? Bagi kaum Sofis kata-kata tidak mewakili sebuah kebenaran objektif. Di tangan mereka, kata-kata bisa menciptakan kebenarannya sendiri *out of nothing*. Mereka mementingkan efektivitas kata-kata yang mampu mempersuasi audiens bahwa “yang dikatakan itulah yang benar”. Maka kebenaran pun versinya tergantung pada pemesan: Anda ingin kebenaran yang seperti apa, potongan dan jahitan yang bagaimana? Tidak ada kebenaran objektif dan universal, kebenaran adalah soal bagaimana membuat orang percaya bahwa yang Anda katakan itu benar. Ini yang mengkhawatirkan dengan Sofisme. Platon dan Aristoteles selalu curiga dengan kaum Sofis yang mengajar dengan menentukan tarif bayaran yang tinggi. Uang tampaknya menjadi motif utama di balik jualan kepintaran mereka.

Di era kita sekarang ini, tafsiran terhadap Sofisme menjadi lebih kaya, dan banyak juga yang mengapresiasinya (John Gibert, 2003, hl. 28-29). Selain para pengacara (*lawyers*) dan para pakar pelintir istilah (*spin doctors*) yang setiap hari kita saksikan di televisi dan media, di wilayah Filsafat, figur-figur kaum Sofis kontemporer adalah para filsuf postmodern seperti Derrida dan Lyotard yang terkenal dengan analisis-*analisis* canggih nan *njlimet*. “*More recent work by French theorists such as Jacques Derrida (1981) and Jean Francois-Lyotard (1985) suggests affinities between the sophists and postmodernism*” (bdk. “The Sophist”, *Internet Encyclopedia of Philosophy*). Franco Trabattoni menyebut bahwa Sofisme saat ini adalah protagonis filsafat di mana nihilisme (kekosongan nilai, ketiadaan makna) menyeruak dari analisis-*analisis* dekonstruksi dan pemikiran postmodern (Franco Trabattoni, hl. 14).

EPILOG

Schopenhauer dan Debat Sofistik di Era Demokrasi

Di era demokrasi orang bebas berkata-kata. Regim reformasi saat ini dipenuhi *copas* BBM, WA dan aplikasi *media sosial* yang saling berbantahan berebut mendapatkan perhatian. Terlalu terikat dengan info *online internet* membuat kita *misinformed* (karena informasi yang berlebihan membunuh informasi itu sendiri, sehingga yang disebar adalah disinformasi). Muncullah generasi dengan jiwa galau dan rindu pada kepastian. Sementara menghindari internet, memilih hidup *offline* membuat kita *uninformed*, terputus dari gejolak hidup di sekitar kita. Maka kuncinya adalah mampu membaca informasi dengan menelaah cara-cara orang memberikan informasi. Arthur Schopenhauer memberikan tips menarik untuk memahami maksud-maksud di balik kata-kata, argumen, wacana, singkatnya informasi, yang bersliweran di sekitar kita.

Bagi Schopenhauer, diskusi, debat, atau dialektika, tidak lain adalah **ketrampilan untuk menang**, tidak lebih dan tidak kurang. *Erizein* (bahasa Yunani yang artinya “bertempur”, yang menjadi akar kata istilah **dialektika eristik**) adalah teknik berargumentasi yang tujuannya memenangkan pendapat sendiri – dan sama sekali tidak peduli dengan kebenaran objektif yang diperdebatkan. Dialektika eristik (*dialectica eristica*) mencari kemenangan argumen, lepas dari soal apakah argumen tersebut benar atau salah. *Per fas et nefas* (entah kita benar atau salah, dalam keadaan apa pun) kita harus menang ! (bdk. A. Schopenhauer, *L'art d'avoir toujours raison*, 1990, hlm. 7). *Watou suloyo* (asal membantah, jangan mau kalah).

Mengapa manusia berdebat? Bagi Schopenhauer akarnya ditemukan pada **kodrat spesies manusia yang memang menyimpang!** Jika saja manusia berkodrat baik, maka kita semua akan jujur, sehingga dalam diskusi dan debat semua pihak berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran. Jika manusia baik, perdebatan berjalan *lempeng*, semua berusaha mencari kebenaran, sehingga bila argumennya salah, dengan *legawa* (besar hati) akan menanggalkan pendapatnya dan mendukung pendapat orang lain yang lebih benar. Masalahnya, hal itu jarang kita lihat!

Sudah kodrat manusia suka berlagak *sok* hebat, bangga dengan selebritas yang sia-sia (*vanitas*). Di mana pun, orang tidak senang bila pendapatnya terbukti salah. Dan lebih tidak suka lagi bila harus mengakui bahwa pendapat lawannya ternyata benar! Hasratnya yang hampa akan kehebatan ditemani oleh kesembronoan berbahasa. Lebih sering manusia membuka mulut tanpa menimbang apa yang hendak dikatakan. Lidahnya lebih cepat beraksi daripada pikirannya. Pun kalau kata-kata yang terlontar disadari keliru, seringkali manusia terlanjur malu untuk mengakuinya. Maka untuk mengoreksi kesalahannya, ia mencari kata-kata lain guna menutupi kesalahan awal yang tak hendak ia akui.

Dalam situasi seperti itu, yang dinamakan dialog, debat atau adu argumentasi, akhirnya tidak memedulikan kebenaran. Dalam banyak kasus, motif utama orang mempertahankan pendapat bukanlah kebenaran, melainkan harga diri hampa (*vanitas*). Dan demi kemegahan diri yang kosong, banyak orang berwacana supaya yang benar tampak salah dan yang salah tampak benar (A. Schopenhauer, 1990, hlm. 8).

Ada beberapa alasan serius untuk memahami sifat manusia yang menyimpang ini. Pertama, dalam kasus tertentu, seseorang bisa jadi memang yakin betul dengan kebenaran pendapat yang dikemukakan. Kemudian, ia melihat bahwa argumen lawan menjungkalkan pendapatnya. Nah, saat hendak menyerah kalah dan mengakui bahwa argumen lawan lebih benar, biasanya pada saat itu juga ia sadar bahwa apa yang ia kemukakan sebenarnya "*toh* tidak sepenuhnya salah". Orang sadar bahwa meski argumennya kalah, ada sesuatu yang masih benar dalam pendapatnya. Dari pengalaman seperti itu, orang lantas berhandai-handai mencari-cari bukti lain yang bisa menyokong argumennya yang rasanya "*toh* tetap ada benarnya".

Orang lalu berpikir: pun jika argumen lawan memang benar dan lebih valid, *toh* aku harus tetap menyerang, karena argumennya hanya "*tampaknya* saja benar". Dan sambil berpikir-pikir seperti itu, ia berharap bahwa selama proses perdebatan bisa menemukan hal-hal kecil yang bisa membantu mempertahankan pendapatnya, syukur-syukur membalikkan situasi dan mengalahkan argumen lawan.

Kedua, dalam kasus lain, ketika berdebat dan mendengarkan argumen dengan teliti, bisa jadi orang sadar bahwa lawan bicara mengatakan kebenaran. Namun, kita tidak bersegera mengiyai kebenaran itu karena kita berpikir: kalau aku menyetujuinya, apa jaminannya bahwa lawan akan melakukan yang sama saat ia mendengarkan kebenaran pendapatku? Bukankah jarang orang melakukannya? Harga diri hampa mencegahnya membuat pengakuan seperti itu. Oleh karenanya, sangat masuk akal bila kita juga tidak terburu-buru mengakui kebenaran pendapat orang lain. Memang gampang mengatakan bahwa dalam berdebat semua pihak mesti sama-sama mencari kebenaran obyektif! Masalahnya, bila kita mencari kebenaran obyektif, apa jaminannya bahwa lawan bicara melakukan yang sama? Tanpa jaminan yang pasti, lebih aman bila kita tidak mengandalkan pengandaian seperti itu.

Ketiga, kita semua sadar akan karakter gelap kebenaran. Dalam anggar intelektual, di mana setiap pihak menggunakan segala daya untuk menunjukkan bahwa argumennya *tampak* logis. Soalnya sekali lagi bukanlah mencari kebenaran obyektif. Mengapa? Karena menurut Schopenhauer kebenaran obyektif sulit ditemukan. Kita maupun lawan debat sejatinya sama-sama tidak tahu sejauh mana masing-masing pihak benar atau salah. Yang jelas kita "*yakin*" dengan apa yang kita katakan, dan lawan juga "*percaya*" dengan argumen yang dia usung. Namun kita semua tidak tahu apa itu kebenaran obyektif, karena seperti kata Demokritos *en bouthô he aletheia, veritas est in puto, kebenaran ada di sumur yang gelap* (A. Schopenhauer, 1990, hlm. 13).

Oleh karena itu, yang paling penting adalah meyakinkan lawan (dan orang lain), dengan cara apa pun, bahwa pendapat kitalah yang benar (pun bila kita sadar bahwa sebenarnya argumen kita meragukan). Itulah perdebatan demi kenikmatan berdebat, dimana yang terpenting bukanlah

kebenaran, melainkan bagaimana berperang memenangkan pendapat sendiri, dalam situasi apa pun (*per fas et nefas*) (A. Schopenhauer, 1990, hlm. 9).

Tips Schopenhauer Untuk Menang Dengan Cara Apapun

Bagaimana caranya memenangkan pendapat? Schopenhauer memberikan banyak trik yang bisa dipakai agar kita tidak kalah berdebat, dan selalu tampak benar. Ada **dua modus (cara)** dan **dua metode** untuk menolak argumen lawan (A. Schopenhauer, 1990, hlm. 17-18, 35, 52-53).

Dua modus meruntuhkan argumen lawan adalah: 1) menggunakan **argumentum ad rem** (menunjukkan argumen lawan tidak sesuai dengan "hal-nya" yang diperdebatkan), atau, 2) menggunakan **argumentum ad hominem** atau **ex concessis** (menunjukkan bahwa argumen lawan tidak cocok dengan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan pernyataan atau diri si pembicara; *modus* ini tidak mempersoalkan kebenaran objektif atau hal yang diperdebatkan).

Contoh untuk **argumentum ad hominem**, misalnya bila ada orang berargumentasi bahwa Jakarta adalah kota yang kotor dan penuh polusi, maka, sebagai pejabat tata kota, Anda menjawab singkat: "Mengapa Anda masih tinggal di sini? Pulang saja ke desa!". Argumen yang menyerang langsung pribadi lawan bisa beranak-pinak: a) *tu quoque* (kamu juga begitu): misalnya, bila seorang dosen menasehati mahasiswa supaya memakai sepatu tertutup di kelas demi sopan santun akademik, si mahasiswa menjawab "Lha, Bapak sendiri pakai sandal *tuh*"; b) *menunjuk konteks pribadi* yang dimaksud (misalnya seorang tokoh membuat parpol baru yang pluralis, lalu mulai berkothbah tentang Pancasila, maka orang berkomentar "bukannya *pas* Pilkada kemarin dia rasis dan anti agama lain?"; c) *mengasosiasikan* pribadi tertentu dengan konteks lebih luas (misalnya tokoh A menolak hukuman mati, padahal pemerintah sedang *getol* menghukum mati penjahat narkoba, maka orang-orang menyerang si tokoh A dengan mengatakan "A menolak hukuman mati, karena dia pro narkoba"!)

Sementara **dua metode** yang bisa dipakai untuk mengalahkan lawan adalah: 1) **penolakan langsung** (menyerang landasan argumen lawan secara langsung; cara ini untuk menunjukkan bahwa argumen lawan tidak benar), atau, 2) **penolakan tidak langsung** (menyerang argumen lawan dengan menelisik konsekuensi-konsekuensi dari argumen tersebut; cara ini untuk menunjukkan bahwa setelah meneliti konsekuensi-konsekuensinya maka argumen lawan tidak mungkin benar).

Dalam metode **penolakan langsung**, ada beberapa cara yang bisa dipakai. A) dasar argumen lawan salah, sehingga yang lainnya juga salah (*negō majorem, negō minorem*, aku menolak tesis mayornya, maka yang minor juga aku tolak). B) dasar argumen diterima, namun konsekuensi darinya tidak bisa diterima (dengan demikian argumen diruntuhkan dengan merujuk pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak masuk akal).

Untuk metode **penolakan tidak langsung**, taktiknya misalnya adalah sbb. A) *apagoge* (tesis lawan diterima, kemudian tesis ini dikombinasikan dengan tesis lain yang umumnya dianggap benar oleh kebanyakan orang; dan hasil kombinasinya akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi yang aneh; lewat proses ini ditampakkkan bahwa tesis awal sebenarnya salah, karena bila digabungkan dengan kebenaran umum lainnya ternyata hasilnya aneh). B) *enstasis, exemplum in contrarium* (menggunakan berbagai macam contoh konkret dan partikular untuk membuktikan bahwa tesis dasar lawan sama sekali tidak bisa dipraktekkan. Dan karena tidak bisa diterapkan, maka otomatis salah). Orang sering menggunakan cara argumentasi ini: "Teorinya *sih* sudah benar, tetapi mengapa prakteknya susah ya? Jangan-jangan memang teori Anda yang salah!". Bila contoh praktis partikular makin banyak ditunjukkan, makin kelihatan teori dasar (tesis) lawan *impossible*.

Contoh paling banyak metode debat *waton suloyo* bisa kita lihat setiap hari di berita *online* dan komentar-komentar atasnya. Di Koran Prancis *Libération*, ada berita *online* tentang seorang wakil rakyat dari Partai Komunis Prancis (PCF) Jean-Jacques Candelier yang menyatakan bahwa situs porno di Internet telah menjadi bencana nasional. Anak-anak mengakses situs-situs ini sejak usia dini. Negara harus melindungi anak-anak, untuk itu ia mengusulkan UU yang mengontrol situs porno, sehingga situs

ini hanya bisa diakses dengan kode tertentu. Menurutnya, hal serupa telah diupayakan selama dua tahun oleh David Cameron (PM Inggris) (bdk. artikel Cécile Bourgneuf, "Vers la fin des sites porno pour tous", 15 Juillet 2015).

Membaca berita seperti itu, para komentator mendebat dan berusaha mengalahkan ide Bapak Candelier. Ada yang memakai argumen *ad rem* secara langsung: "Bukankah cara mengontrol situs porno dengan program komputer terbukti tidak efektif? Program yang diciptakan biasanya 'terlalu longgar' memfilter (sehingga terlalu banyak yang lolos) atau 'terlalu ketat' memfilter sehingga justru banyak situs kesehatan yang tidak bisa diakses. Tidak mungkin kita mengontrol situs porno lewat program komputer. Sudah terbukti tidak berjalan." Ada pula yang memakai argumen *ad rem* (secara tidak langsung): "Sebenarnya dari dulu para penyedia situs porno sendiri sudah mengusulkan nama 'xxx' (supaya terpisah dari 'www') sehingga situsnya hanya bisa diakses lewat jalur terpisah. Tetapi *lobby* para pembuat program filter komputer tampaknya terlalu kuat sehingga usulan bagus itu justru tidak ditanggapi serius. Maka percuma saja mengusulkan UU yang akan dikalahkan oleh *lobby* para pebisnis program komputer".

Sementara banyak juga pembaca yang menggunakan *argumentum ad hominem* untuk mendiskreditkan usulan di atas: "Wah, Pak Candelier ini pasti sudah impoten, makanya dia *gak* suka melihat anak-anak muda menikmati kemudahan mereka." Ada juga yang menulis: "Kok aneh ya ada orang komunis mengusulkan UU yang penuh moral borjuis, *sok* serba baik dan sopan? Sejak kapan orang komunis bermental borjuis-konservatif?" Atau, dengan cara sarkastik: "Sekarang terbukti bahwa Komunisme memang sebuah Agama yang moralistik", atau "Pak Candelier, *mending* Bapak pindah partai saja, *ikutin sono* David Cameron di Inggris".

Pembaca lain berkomentar dengan melakukan *penolakan langsung (nego majorem, nego minorem)*: "Urusan pendidikan moral dan seksual anak-anak adalah urusan pribadi, urusan orang tua di rumah. Negara tidak boleh campur tangan. Ini adalah prinsip kebebasan yang tidak boleh dikekang oleh siapa pun (termasuk Negara). Apakah Negara yang menentukan mana yang baik/buruk bagi kita? Tiap orang bebas menentukan apakah apa yang ia lihat itu porno atau tidak. Usulan wakil rakyat itu tidak relevan." Sementara metode *penolakan tidak langsung* dijalankan dengan memperlihatkan konsekuensi aneh dari usulan tersebut: "Bapak Candelier ini contoh orang komunis yang kurang kerjaan! Anda lihat contoh Uni Sovyet yang mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat dengan peraturan. Uni Sovyet menyeragamkan dan menciptakan manusia rata-rata, sehingga kreativitas tumpul dan kemajuan menguap. Limapuluh tahun Uni Sovyet berkuasa, 50 tahun pula mereka jalan di tempat (ketinggalan jaman)".

Dua *modus* dan *metode* yang dipakai Schopenhauer dalam bukunya *The Art of Being Right (Die Kunst, Recht zu behalten)* dijabarkan menjadi banyak sekali dalam debat supaya "Anda menang dengan cara apapun". Misalnya: menggunakan homonimi (sama bunyi tetapi maknanya berbeda); menggunakan strategi *pars pro toto* (pernyataan lawan bicara yang partikular digeneralikan) dan *totem pro parte* (pernyataan lawan yang umum kita sempitkan); menggunakan metafor yang memojokkan (misalnya penggunaan akronim "sepilis (baca: sipilis)" sebagai kependekan dari "sekularis, pluralis dan liberalis" untuk memojokkan kelompok lawan); menempatkan argumen lawan di bawah kategori menyeramkan yang pasti disambut negatif oleh audiens (misalnya: "wah pendapat Anda itu berbau komunis ya?"); mempertahankan diri dengan mempresiskan konsep setipis rambut dibelah tujuh agar tetap di atas angin (misalnya, "siapa bilang membatalkan, kami hanya menunda kok"); memotong pembicaraan, memecah konsentrasi lawan, lalu mengalihkan argumen ke yang Anda kehendaki; memprovokasi lawan agar marah (dalam debat capres 2014, JK bertanya kepada Prabowo "Apa pendapat Bapak tentang penegakan HAM"); menggunakan argumen otoritas (*argumentum ad verendum*, misalnya: "larangan ini yang mengatakan bukan aku lho, tetapi Tuhan Allah sendiri"); menghindari medan sulit dengan mengatakan "soal seperti itu di luar kapasitas saya untuk menjawabnya"; menghindari lawan dan meminta dukungan audiens; memberi *argumentum ad hominem* lebih buruk bila lawan menggunakannya; memprovokasi lawan dengan berbagai pertanyaan agar pernyataannya makin meluas dan kelihatan aneh; *retorsio argumenti* (membalikkan argumen ke lawan, misalnya, saat dituduh mengajarkan radikalisme dan kekerasan kepada anak-anak SD Asshafa karena mementaskan teater dengan tema jihad Palestina melawan Israel, di mana anak-anak memakai senjata mainan, maka sang kepala sekolah Tomi Rohili membalikkan argumen dan berkata: "kami ini tidak mengajarkan kekerasan dan kebencian. Kami justru mengajarkan kepedulian pada sesama, kepada perjuangan Palestina")

(Tempo, Jumat, 17 Juli 2015); saat lawan kelihatan bingung dan mencoba mengalihkan tema perdebatan, itu tanda bahwa Anda menyentuh titik lemahnya, maka tekan terus lawan meski Anda sebenarnya juga tidak tahu di mana persisnya titik kelemahannya; menunjukkan emosi marah bersikap keras dan kasar untuk mengintimidasi lawan (*argumentum ad personam*, objek debat dialihkan dan diganti seolah menjadi persoalan pribadi Anda dengan dia), dll. Contoh argumen *ad personam* adalah ketika petugas keamanan mendatangi sekelompok orang yang sedang beracara, lalu mempersoalkan ijin acara atau tema sensitif tertentu. Setelah berdebat, kemudian muncullah kata-kata: "Hati-hati, acara kalian akan diserbu kelompok fundamentalis, jadi demi keamanan kalian sendiri, silahkan membubarkan diri, karena kami tidak bertanggungjawab" (Tempo.co, Jumat 24 Juli 2015). Di depan argumen seperti ini panitia acara pasti *speechless* dan memilih cepat-cepat menyelamatkan diri.

Dialektika eristik memang berbentuk dialektis (tanya jawab), namun tujuannya lebih mirip retorika (yaitu memenangkan argumen). Eristik berasal dari kata *erizein* yang artinya "bertempur" dan *eris* (yang artinya peperangan, perbantahan) (Luc Brisson, 1997, hlm. 107-108, Franco Volpi dalam *L'art d'avoir raison*, hlm. 89). Eristik adalah ketrampilan diskusi dimana orang berdebat untuk memenangkan pendapatnya. Lewat argumen kontradiktif, eristik hanya memperhatikan bagaimana caranya bisa menang argumen. Karena tidak mencari kebenaran, maka pihak yang berdebat tidak membuka pikiran untuk mengapresiasi posisi lawan, melainkan melulu mencari titik lemah argumen lawan.

Dengan pemahaman atas dialektika seperti di atas Schopenhauer mirip dengan kaum Sofis di era Yunani Kuno yang menjadi lawan-lawan Sokrates dan Platon. **Di mana titik perbedaannya? Pada asumsi dasar mereka tentang manusia dan realitas.** Sokrates dan Platon, adalah orang-orang yang percaya bahwa manusia pada kodratnya baik, bahwa realitas berkodrat baik, sehingga pencarian kebenaran mungkin dilakukan. Sementara kaum Sofis dan Schopenhauer tidak percaya pada kodrat baik manusia maupun realitas. Kita tentu ingin mengikuti yang pertama (Sokrates), meski kadang jatuh menjadi naif; dan meski secara intuitif sebal dengan pendapat terakhir (kaum Sofis), faktanya seringkali justru yang ini yang kita hidupi sehari-hari.

BIBLIOGRAFI:

- Arthur Schopenhauer, A, *L'art d'avoir toujours raison*, Paris: Circé/Poche, 1990. Teks pendek ini ditulis oleh Arthur Schopenhauer di Berlin tahun 1830-1831, dan diterbitkan pertama kali oleh Julius Frauenstädt dengan judul *Arthur Schopenhauers handschriftlicher Nachlass*, Leipzig: Brockhaus, 1864. Terjemahan dari bahasa Jerman ke bahasa Perancis dilakukan oleh Henri Plard.
- Cécile Bourgneuf, "Vers la fin des sites porno pour tous", 15 Juillet 2015, pk. 19.10, dalam http://www.liberation.fr/societe/2015/07/15/vers-la-fin-des-sites-pornos-pour-tous_1348429
- Catherine Osborne, *Presocratic Philosophy: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, 2004, hl. 112-131.
- Franco Volpi, "Schopenhauer et la dialectique", dalam buku *Schopenhauer: L'art d'avoir toujours raison*, Paris: Circé/Poche, 1990.
- Frederick Copleston, *A History of Philosophy, Volume I Greece and Rome*, London: Burns Oates & Washbourne Ltd, 1951.
- Georges Leroux, *Platon, La République*, Traduction inédite, introduction et notes par Georges Leroux, Paris: G. F. Flammarion, 2002.
- Henri-Irénée Marrou, *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, I: Le monde grecque*, Paris: Seuil, 1964 (1948).
- Internet Encyclopedia of Philosophy*, "The Sophists (Ancient Greek)", <http://www.iep.utm.edu/sophists/>
- Jacqueline de Romilly, *Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès*, Editions de Fallois-Livre Poche Biblio Essais, 1988.
- John Gibert, "The Sophists", dalam *The Blackwell Guide to Ancient Philosophy*, (ed. Christopher Shields), Oxford: Blackwell Publishing, 2003, hl. 27-50.
- Jean-François Pradeau, dalam introduksi untuk, *Les Sophistes I, De Protagoras à Critias : Fragments et témoignages*, Paris: GF Flammarion, 2009.
- Luc Brisson, « Les Sophistes », *Philosophie grecque*, Paris : PUF, 1998 (edisi pertama 1997).
- Monique Canto Sperber, "Platon", *Philosophie grecque*, PUF, 1998 (edisi pertama 1997).
- Roslyn Weiss, "Wise Guys and Smart Alecks in Republic 1 and 2", dalam *The Cambridge Companion to Plato's Republic*, (ed. by G. R. F. Ferrari), Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hl. 90-115.
- Setyo Wibowo, A. *Areté: Hidup Sukses Menurut Platon*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010, hl. 106-113, 144-154.
- Suara Pembaruan*, artikel Tjipta Lesmana, "Pancasila dan Pilkada Langsung", Selasa, 9 September 2014, hl. A 11.
- Tempo*, Kamis 10 Juli 2014, pk. 09.42 WIB, "Bertemu SBY, Prabowo Curhat Soal Jokowi", <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/10/269591939/Bertemu-SBY-Prabowo-Curhat-Soal-Jokowi>.
- Tempo*, Jumat, 17 Juli 2015 | 12:47 WIB; "SD Asshafa Depok Bantah Ajarkan Radikalisme Lewat Teater", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/17/079684589/sd-asshafa-depok-bantah-ajarkan-radikalisme-lewat-teater>
- Tempo.co*, Jumat 24 Juli 2015, "Buntut Tolikara: Polisi Bubarkan Pameran Lukisan di Yogya", <http://m.dev.tempo.co/read/news/2015/07/24/058686282/Buntut-Tolikara-Polisi-Bubarkan-Pameran-Lukisan-di-Yogya>
- Koran Tempo*, "Palestina, Sacco, dan Jurnalisme Komik", Minggu, 14 September 2014, hl. 11.
- The New Oxford Dictionary of English*, Oxford: Clarendon Press, 1998.
- Trabattoni, Franco "Prefazione", *I Sofisti*, (ed. Mauro Bonazzi), Milano: BUR, 2007.
- Vocabulaire européen des philosophies*, « Sophisme, Sophiste », Paris : Seuil-Le Robert, 2004, hl. 1198.
- Werner Jaeger, *The Theology of the Early Greek Philosophers*, Oxford: Clarendon Press, 1948.